



**RENCANA KERJA OPERASIONAL KEGIATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
2019**

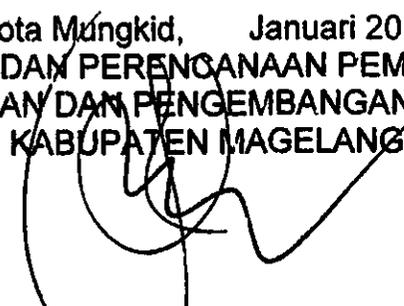
KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang atas rahmat dan hidayahNya kita telah memasuki Tahun Anggaran 2019. Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 akan dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019. Guna menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan tersebut maka Bappeda dan Litbangda menyusun Rencana Kerja Operasional Kegiatan.

Rencana Kerja Operasional Kegiatan disusun sebagai pedoman perencanaan pelaksanaan kegiatan sehingga diharapkan kegiatan akan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dalam Rencana Kerja Operasional Kegiatan ini memuat indikator kinerja kegiatan dan rencana pendanaan berdasarkan Anggaran Kas yang telah disusun.

Rencana Kerja Operasional Kegiatan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja pada tahun berkenaan. Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Operasional Kegiatan ini masih banyak kekurangannya, sehingga kritikan dan masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai dasar untuk kemajuan Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang dimasa yang akan datang .

Kota Mungkid, Januari 2019
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG


Drs. SUGIYONO, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640102 198405 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
RENCANA KERJA OPERASIONAL	
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	
4. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	
5. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	
C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
D. Program Pengembangan Data/Informasi	
1. Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	
2. Fasilitasi Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan	
3. Penguatan Sistem Inovasi Daerah	
4. Fasilitasi Dewan Riset Daerah	
5. Fasilitasi Kelitbangan	
E. Program Pengembangan Perumahan	
1. Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Perumahan	
F. Program Kerjasama Pembangunan	
1. Fasilitasi Sibermas dan Pengabdian Masyarakat	
G. Program Lingkungan Sehat Perumahan	
1. Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Kinerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)	
H. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
1. Penyusunan KUA dan PPAS	
I. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	
1. Penyusunan RPJMD	
2. Perencanaan Umum Pembangunan Daerah	
3. Evaluasi RKPD	
4. Penyusunan Renja SKPD	
5. Penyusunan Renstra SKPD	
6. Evaluasi RPJMD	
J. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	
1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	
2. Forum For Economic and Employment Promotion (FEDEP)/Forum Pengembangan Ekonomi Daerah dan Penciptaan Kesempatan Kerja Kabupaten Magelang (BANGUB)	
K. Program Perencanaan Sosial dan Budaya	
1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	
2. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	

4. Penyusunan Renja SKPD
 5. Penyusunan Renstra SKPD
 6. Evaluasi RPJMD
- J. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
 2. Forum For Economic and Employment Promotion (FEDEP)/Forum Pengembangan Ekonomi Daerah dan Penciptaan Kesempatan Kerja Kabupaten Magelang (BANGUB)
- K. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
 2. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan
 3. Fasilitasi Kinerja PUS
- L. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Tata Ruang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur

RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

I. PENDAHULUAN

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan merupakan kegiatan rutin Bappeda dan Litbangda berupa penatausahaan keuangan, mulai dari perencanaan anggaran sampai dengan pelapcran realisasi keuangan. Penatausahaan Keuangan SKPD memedomani Peraturan Bupati Magelang tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah.

Dengan telah disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 maka Bappeda dan Litbangda memasuki periode baru dalam penatausahaan keuangan.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan yang dilaksanakan oleh Subbagian Keuangan Sekretariat Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang berupa:

1. Penyusunan RKA SKPD, DPA SKPD, RKAP SKPD, dan DPPA SKPD
2. Penatausahaan Keuangan meliputi Uang Persediaan, pertanggungjawaban keuangan Ganti Uang (GU), Langsung (LS), maupun Tambah Uang Persediaan (TU)
3. Pengumpulan SPJ dari PPTK dan Kasir Kegiatan
4. Verifikasi SPJ
5. Penyusunan Surat Pertanggungjawaban Belanja Administrasi dan Fungsional (SPJBA dan SPJBF)
6. Rekonsiliasi Realisasi Anggaran
7. Penyusunan Laporan Realisasi dan Prognosis Akuntansi
8. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan:
 - a. RKA SKPD 2020 : setelah persetujuan KUA dan PPA 2020
 - b. DPA SKPD 2020 : setelah persetujuan RAPBD 2020
 - c. RKAP SKPD 2019 : setelah persetujuan KUA dan PPA Perubahan 2019

- d. DPPA SKPD 2019 : setelah persetujuan RAPBDP 2019
2. Penatausahaan Keuangan meliputi Uang Persediaan, pertanggungjawaban keuangan Ganti Uang (GU), Langsung (LS), maupun Tambah Uang Persediaan (TU) setiap bulan
 3. Pengumpulan SPJ dari PPTK dan Kasir Kegiatan setiap bulan
 4. Verifikasi SPJ setiap bulan
 5. Penyusunan Surat Pertanggungjawaban Belanja Administrasi dan Fungsional (SPJBA dan SPJBF) setiap bulan
 6. Rekonsiliasi Realisasi Anggaran setiap akhir triwulan.
 7. Penyusunan Laporan Realisasi dan Prognosis Akuntansi akhir semester I.
 8. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada akhir tahun anggaran.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan sebagaimana tertuang dalam DPA sejumlah Rp 77.000.000,00 dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut :

- Triwulan I : Rp 16.741.000,00
 - Triwulan II : Rp 21.146.250,00
 - Triwulan III : Rp 20.725.900,00
 - Triwulan IV : Rp 18.386.850,00
- JUMLAH : Rp 77.000.000,00

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Rencana prosentase target fisik dan keuangan per bulan Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

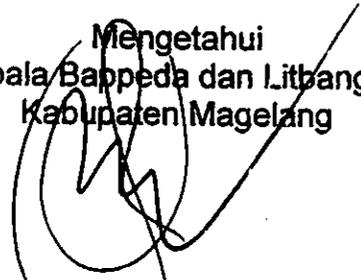
Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp	%	
Januari	10	5.410.000,00	7,03	
Februari	15	9.600.000,00	12,47	
Maret	25	16.741.000,00	21,74	
April	35	23.758.750,00	30,86	
Mei	40	30.603.750,00	39,75	
Juni	50	37.887.250,00	49,20	

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp	%	
Juli	65	46.275.125,00	60,10	
Agustus	70	51.516.275,00	66,90	
September	80	58.613.150,00	76,12	
Oktober	85	65.313.150,00	84,82	
Nopember	95	72.000.000,00	93,51	
Desember	100	77.000.000,00	100,00	

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan TA 2019 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Mengetahui
Kepala Bappeda dan Litbangda
Kabupaten Magelang


Drs. SUGIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, 2 Januari 2019
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


MIRA FATIMAH, S. Sos., M. P. A.
Penata Tingkat I
NIP 19811218 200501 2 016

RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
REALISASI KINERJA SKPD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

I. PENDAHULUAN

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2018 sudah menjadi kewajiban Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda dan Litbangda) untuk menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Laporan yang harus disusun terdiri dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Bahan Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magelang, Pengisian Indikator Kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK LPPD), dan Laporan Hasil Evaluasi Rencana Kerja SKPD Tahun 2019. Selain empat dokumen tersebut, Bappeda dan Litbangda juga menyusun Laporan Pengendalian Kegiatan setiap bulannya.

Seluruh kegiatan penyusunan laporan tersebut terangkum dalam Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan oleh Subbagian Program pada Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang berupa :

1. Penyusunan Perjanjian Kinerja
2. Perubahan Perjanjian Kinerja
3. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan
4. Penyusunan Laporan Pengendalian Kegiatan
5. Penyusunan Laporan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
6. Input data TEPPA
7. Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Rencana Kerja SKPD
8. Penyusunan Laporan Monitoring Perjanjian Kinerja
9. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2018
10. Pengumpulan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD 2018
11. Penyusunan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magelang Tahun Anggaran 2018
12. Pengisian Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK EKPPD) 2018 dan dokumen pendukungnya.

13. Penyusunan Bahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2019 setelah penyusunan Renja SKPD 2020.
14. Penyusunan Bahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Perubahan Anggaran Sementara Perubahan 2019.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Pengendalian Kegiatan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
2. Input data TEPPA paling lambat tanggal 6 bulan berikutnya.
3. Penyusunan Laporan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Rencana Kerja SKPD setiap akhir triwulan (Maret, Juni, September, Desember).
5. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Perjanjian Kinerja setiap akhir triwulan (Maret, Juni, September, Desember).
6. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
7. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 paling lambat tanggal Minggu I Januari 2019
8. Pengumpulan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD 2019 paling lambat 2 (dua) minggu setelah DPA ditandatangani.
9. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2019 paling lambat 1 (satu) minggu setelah DPA ditandatangani.
10. Penyusunan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magelang Tahun Anggaran 2018 pada bulan Januari 2019
11. Pengisian Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK EKPPD) dan dokumen pendukungnya pada bulan Januari 2019.
12. Penyusunan Bahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2020 setelah penyusunan Renja PD 2020.
13. Penyusunan Bahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Perubahan Anggaran Sementara 2019.
14. Perubahan Perjanjian Kinerja 2019 paling lambat satu minggu setelah DPPA SKPD ditetapkan.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebagaimana tertuang dalam DPA sejumlah Rp 8.544.000,00 dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut:

- Triwulan I : Rp 3.530.700,00
- Triwulan II : Rp 1.906.700,00
- Triwulan III : Rp 1.981.600,00
- Triwulan IV : Rp 1.125.000,00
- JUMLAH : Rp 8.544.000,00**

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp.	%	
Januari	5	375.000,00	4,39	
Februari	40	3.155.700,00	36,93	
Maret	45	3.530.700,00	41,32	
April	50	3.920.700,00	45,89	
Mei	60	5.062.400,00	59,25	
Juni	65	5.437.400,00	63,64	
Juli	70	5.887.400,00	68,91	
Agustus	75	6.262.400,00	73,30	
September	90	7.419.000,00	86,83	
Oktober	95	7.794.000,00	91,22	
November	98	8.169.000,00	95,61	
Desember	100	8.544.000,00	100,00	

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD TA 2019 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Mengetahui
Kepala Bappeda dan Litbangda
Kabupaten Magelang

Drs. SUGIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, 2 Januari 2019
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


MIRA FATIMAH, S. Sos., M. P. A.
Penata Tingkat I
NIP 19811218 200501 2 016

RENCANA KERJA OPERASIONAL
PENYUSUNAN SIPD
TAHUN ANGGARAN 2019

I. PENDAHULUAN

Perencanaan berperan sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut dilakukan melalui serangkaian pelaksanaan pembangunan daerah dari berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur maupun aspek lainnya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang tata cara pengolahan data dan informasi gambaran umum kondisi daerah yang meliputi data kondisi geografis dan demografis daerah, dan data terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Penyusunan SIPD di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan Bidang Rendalev Bappeda & Litbangda berupa :

- Membentuk Tim Pengelola SIPD Kabupaten
- Rapat koordinasi Tim Pengelola SIPD Kabupaten dengan materi :
 - ✓ Pemetaan kebutuhan data
 - ✓ Pengumpulan kelompok data SIPD Kabupaten Magelang dan Kecamatan
 - ✓ Mengentry serta updating data Kabupaten Magelang Tahun 2019 secara online melalui aplikasi www.sipd.kemendagri.go.id
 - ✓ Validasi data melalui e-Database SIPD
 - ✓ Evaluasi data
 - ✓ Penyusunan Buku SIPD Tahun 2019 berisi analisis data SIPD yang dilengkapi dengan gambar, table dan foto

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SIPD di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

- ✓ Bulan Januari – Februari : Menyusun SK Tim
- ✓ Bulan Maret : Rakor Pokja untuk Pemetaan Kebutuhan Data
- ✓ Maret s.d. Juni : Pengumpulan data SIPD Kabupaten Magelang dan Kecamatan, Mengentry serta updating data Kabupaten Magelang Semester II Tahun 2018 secara online untuk aplikasi SIPD format baru, Validasi Data dan Evaluasi Data
- ✓ Bulan Juli s.d. Desember : Pemetaan Kebutuhan Data, Pengumpulan data SIPD Kabupaten Magelang, Mengentry serta updating data Kabupaten Magelang Semester I Tahun 2019 secara online untuk aplikasi SIPD format baru, Validasi, Analisis dan Evaluasi Data.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Penyusunan SIPD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tertuang dalam DPA sejumlah Rp. 114.590.000,- dengan rincian target penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

Triwulan I : Rp. 5.098.000,00
Triwulan II : Rp. 53.619.000,00
Triwulan III : Rp. 7.700.000,00
Triwulan IV : Rp. 48.174.000,00

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp.	%	
Januari	1	0	0	
Februari	3	3.298.000	2,8	
Maret	5	5.098.000	4,4	
April	10	10.648.000	9,2	
Mei	50	56.916.000	49,6	
Juni	52	58.716.000	51,2	
Juli	55	60.516.000	52,8	
Agustus	58	64.616.000	56,3	
September	60	66.416.000	57,9	
Oktober	65	72.466.000	63,2	
November	99	112.790.000	98,4	
Desember	100	114.590.000	100,0	

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Penyusunan SIPD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Kota Mungkid, Januari 2019

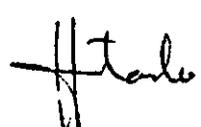
KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA
KABUPATEN MAGELANG


Drs. SUGIYONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640102 198405 1 004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


LONO HARTANTO, S.T, M.Eng

Penata Tingkat I

NIP.19750427 200502 1 005

RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN FASILITASI JARINGAN PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
(JARLIT) KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

I. PENDAHULUAN

Salah satu substansi pengelolaan pendidikan di era otonomi daerah yaitu menjadikan daerah kabupaten/kota saat ini mempunyai kewenangan yang sangat luas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, sampai dengan evaluasi pelaksanaan program. Konsekuensi dari otonomi daerah tersebut yaitu semakin bertambah banyaknya kebijakan yang harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh kabupaten/kota, termasuk kebijakan di bidang pendidikan. Pada era otonomi daerah, kabupaten/kota menghadapi tuntutan dan tantangan di bidang pendidikan terutama dalam hal:

1. Masalah pendidikan yang harus dipecahkan sendiri oleh kabupaten/kota semakin bertambah, seperti: bagaimana memberikan kesempatan pendidikan yang lebih merata dan bermutu, meningkatkan mutu tenaga pendidik, dan memenuhi kebutuhan ideal sarana prasarana pendidikan. serta menentukan dan menyelenggarakan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Di samping itu, masih bervariasinya kemampuan masing-masing daerah dalam mewujudkan misi pendidikan yaitu ketersediaan layanan pendidikan; keterjangkauan layanan pendidikan; kualitas dan relevansi layanan pendidikan; kesetaraan pemberian layanan pendidikan; dan kepastian memperoleh layanan pendidikan (5K);
2. Penetapan kebijakan dituntut lebih cepat untuk dapat merespon dan memecahkan permasalahan yang berkembang di masyarakat karena rentang birokrasi menjadi jauh lebih pendek dengan adanya era otonomi, sehingga akses, mutu dan tata kelola harus menjadi fokus bagi daerah.

Terkait dengan Konsekuensi dari otonomi daerah dan tuntutan serta tantangan bidang pendidikan, Pemerintah daerah perlu memiliki wahana yang membantu Pemerintah Daerah dalam memecahkan masalah kebijakan pendidikan. Salah satu wahana tersebut adalah jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan (JARLIT).

JARLIT merupakan suatu forum yang berfungsi untuk mendukung pimpinan daerah dalam menetapkan kebijakan di bidang pendidikan, dalam bentuk menyampaikan masukan atau usulan-usulan kebijakan, baik diminta maupun tidak diminta untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi daerah dalam penyelenggaraan pendidikan. Di samping itu, JARLIT diharapkan juga untuk bisa membantu mensinkronkan kegiatan penelitian dan pengembangan kebijakan di bidang pendidikan, melalui mekanisme kerjasama baik antar JARLIT daerah

maupun dengan JARLIT Pusat. Penyusunan usulan kebijakan tersebut dilakukan atas dasar hasil penelitian kebijakan dan analisis sektor pendidikan. Dengan cara demikian maka kebijakan pimpinan daerah dapat ditetapkan atas dasar informasi dan fakta yang akurat dari lapangan (*Informed Decision Making*).

Kegiatan JARLIT tidak akan dapat berjalan optimal apabila tidak dikoordinasi dan difasilitasi oleh Pemerintah. Oleh karena itu, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA dan LITBANGDA) Kabupaten Magelang sebagai instansi yang bertanggungjawab terhadap perencanaan, penelitian dan perumusan kebijakan daerah melaksanakan kegiatan Fasilitasi Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan (JARLIT).

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Fasilitasi Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan (JARLIT) di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan oleh Bidang Litbang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA dan LITBANGDA) Kabupaten Magelang berupa lanjutan penelusuran siswa SD/MI yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dengan rincian sebagai berikut :

1. Rapat Tim dan stake holder, dengan target 7 (tujuh) kali, sebanyak 31 orang setiap kali rapat.
2. FGD (foccus group disccution) Tim Peneliti dengan stake holder, dengan target 3 (tiga) kali, sebanyak 25 orang per kali rapat.
3. Sosialisasi pendataan ke sekolah negeri dan swasta sebanyak 2 (dua) kali.
4. Seminar pendidikan, dengan target 1 (satu) kali dengan jumlah peserta 150 orang.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan (JARLIT) di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Rapat Tim Peneliti dan stake holder, diakukan sebanyak 7 (tujuh) kali pada bulan Januari, Februari, Maret dan April, Mei dan Juni 2019.
2. Sosialisasi ke sekolah negeri dan swasta pada bulan Februar dan Maret 2019.
3. Pendataan bulan Maret-Juni 2019
4. Rapat Tim dan stake holder atau *Focus Group Discussion* (FGD), dengan target 3 (tiga) kali, 25 orang setiap kali rapat pada bulan, Mei, Juni dan Juli 2019.
5. Seminar pada bulan Agustus tahun 2019.
6. Perumusan terkait rekomendasi kebijakan pendidkan di Kabupaten Magelang. Agustus dan September 2019.

7. Penyusunan laporan dilakukan pada bulan Oktober 2019.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Kegiatan Fasilitas Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan sebagaimana tertuang dalam DPA 2018 sejumlah Rp 175.700.000,00 dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut:

- Triwulan I :Rp 37.232.000,-
- Triwulan II :Rp 95.780.500,-
- Triwulan III :Rp 22.362.500,-
- Triwulan IV : Rp 20.325.000,-
- JUMLAH :Rp.175.700.000,-

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Rencana prosentase target fisik dan keuangan per bulan Kegiatan Fasilitas Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan (JARLIT) di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

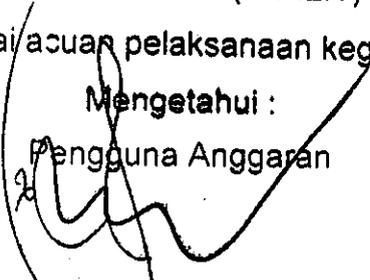
Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan %
		Rp	%	
Januari	0,00	0	0,00	0,00
Februari	5,00	2.466.000	1,40	0,00
Maret	20,00	37.232.000	21,19	0,00
April	50,00	84.405.450	48,04	0,00
Mei	55,00	96.546.450	54,95	0,00
Juni	75,00	132.862.500	75,62	0,00
Juli	85,00	154.055.000	87,68	0,00
Agustus	90,00	154.055.000	87,68	0,00
September	95,00	155.375.000	88,43	0,00
Oktober	100,00	175.700.000	100	0,00
Nopember	100,00	175.700.000	100	0,00
Desember	100,00	175.700.000	100	0,00

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Fasilitas Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan (JARLIT) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Mengetahui :

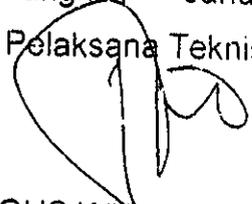
Pengguna Anggaran


Drs. SUGIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, Januari 2019

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


AGUS WIDODO, S.ST
Penata

NIP. 19730925 199703 1002

RENCANA KERJA OPERASIONAL KEGIATAN PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH APBD TA 2019

I. PENDAHULUAN

Muatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Magelang mencakup kebijakan sistem pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta output sistem terkait lain yang dipandang penting bagi penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Magelang. Output inovasi di masing-masing elemen SIDa Kabupaten Magelang yaitu pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan lembaga riset, pelaku usaha, lembaga kemasyarakatan atau ormas serta norma dan etika.

Implementasi SIDa ini mengharuskan terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi yang menghasilkan sinergi positif antar sektor pembangunan ekonomi dan Iptek. Hal tersebut menjadi syarat penting untuk menumbuhkembangkan kapasitas daya saing daerah. Oleh karena itu, dalam merumuskan prospek pembangunan daya saing daerah melalui penguatan SIDa perlu dilakukan identifikasi permasalahan dan kondisi perkembangan SIDa saat ini, mendayagunakan peluang-peluang yang terbuka baik lingkup regional maupun lingkup nasional serta tantangan yang harus diselesaikan.

Penguatan SIDa di Kabupaten Magelang memiliki 3 (tiga) sasaran utama guna menjawab isu-isu strategis yang diklasifikasikan menjadi persoalan-persoalan pembangunan kelembagaan SIDa, penguatan jejaring SIDa serta penguatan sumberdaya SIDa.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 berupa :

1. *Focus Group Discussion (FGD)* tematik dengan stakeholder dari lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN), praktisi, dan akademisi. Topik FGD meliputi indikasi geografis, roadmap SIDa, IDSD, dan topik tentatif sesuai kebutuhan.
2. Penyusunan dokumen Indikasi Geografis Kopi Kabupaten Magelang
3. Optimasi Indek Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Magelang
4. Penyusunan Roadmap SIDa Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024
5. Lomba kreativitas dan inovasi (krenova) bagi masyarakat Kabupaten Magelang.
6. Pengiriman peserta Pameran Produk Inovasi (PPI) tingkat Jawa Tengah.
7. Studi referensi kelitbangan dan SIDa dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
8. Operasional Tim Penguatan SIDa Kabupaten Magelang yaitu berupa kegiatan rapat tim guna membahas penguatan SIDa di Kabupaten Magelang.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. *Focus Group Discussion (FGD)* tematik dengan stakeholder dari lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN), praktisi, dan akademisi,
 - indikasi geografis : Januari & Maret 2019
 - roadmap SIDA : Januari & April 2019
 - IDSD : April - Mei 2019
 - topik tentatif : Juli, Agustus, Oktober 2019
2. Pengurusan Indikasi Geografis Kopi :
 - FGD & pembentukan kelompok masyarakat : Januari 2019
 - Penyusunan dokumen : Januari – April 2019
 - Pendaftaran ke Ditjen HKI : Februari 2019
 - Pengujian : April 2019
3. Optimasi Indek Daya Saing Daerah (IDSD) :
 - FGD : April - Mei 2019
 - Penyusunan dokumen : Januari – Juni 2019
4. Penyusunan Roadmap SIDA :
 - FGD : Januari & April 2019
 - Penyusunan dokumen : Januari – April 2019
 - Pengusulan Perbup : Juni 2019
 - Penetapan Perbup : September 2019
5. Lomba kreativitas dan inovasi (krenova) bagi masyarakat Kabupaten Magelang :
 - Sosialisasi : Juni 2019
 - Penerimaan proposal : Juni – Agustus 2019
 - Penilaian : Agustus 2019
 - Anugerah Lomba Krenova : Oktober 2019.
6. Pengiriman peserta Lomba kreativitas dan inovasi (krenova) tingkat Jawa Tengah : Maret - Mei 2019.
7. Pengiriman peserta Pameran Produk Inovasi (PFI) tingkat Jawa Tengah : September 2019.
8. Studi referensi kelitbang dan SIDA : Juli dan September 2019.
9. Operasional Tim Penguatan SIDA Kabupaten Magelang yaitu berupa kegiatan rapat tim guna membahas roadmap dan implementasi SIDA di Kabupaten Magelang : Januari – Oktober 2019.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tertuang dalam DPPA sejumlah Rp.292.303.000,- dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut:

- Triwulan I : Rp.35.928.950,- (12,29%)
- Triwulan II : Rp.92.920.000,- (31,79%)

- Triwulan III : Rp.93.290.000,- (31,92%)
- Triwulan IV : Rp.70.164.050,- (24%)

V. RENCANA PRESENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

BULAN	TARGET FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		KETERANGAN
		Rp	%	
Januari	5	8,795,000	3,01	
Februari	10	28,828,950	9,86	
Maret	15	35,928,950	12,29	
April	20	60,658,950	20,75	
Mei	30	68,128,950	23,31	
Juni	45	128,848,950	44,08	
Juli	55	153,708,950	52,59	
Agustus	60	160,038,950	54,75	
September	80	222,138,950	76	
Oktober	100	292,303,000	100	
November	100	292,303,000	100	
Desember	100	292,303,000	100	

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Kepala Bappeda & Litbangda
Kabupaten Magelang

Drs. SUGIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, Januari 2019

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

PUJI LESTARI, S.S.T.M.T
Penata Tk. I
NIP. 19780502 199703 2 004

**RENCANA KERJA OPERASIONAL
FASILITASI DEWAN RISET DAERAH (DRD)
TAHUN ANGGARAN 2019**

I. PENDAHULUAN

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari sistem pembangunan daerah yang berfungsi sebagai pengarah yang memberikan rambu-rambu kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan pembangunan secara bertahap. Perencanaan diperlukan karena keterbatasan sumberdaya yang dimiliki dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi sehingga diperlukan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai kegiatan yang harus segera dilakukan yang sifatnya mendesak.

Perencanaan yang baik harus didahului oleh riset. Dengan riset maka akan membantu pengambil kebijakan dalam merumuskan prioritas utama pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Dewan Riset Daerah (DRD) merupakan lembaga yang kegiatannya berkaitan dengan penyusunan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah yang bersangkutan. Dewan Riset Daerah juga berfungsi untuk mendukung pemerintah daerah melakukan koordinasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan daerah-daerah lain, serta mewakili daerah di Dewan Riset Nasional. Peran DRD Dewan Riset Daerah bertugas :

1. memberikan masukan kepada Pemda berupa pemikiran dalam rangka: a) pemetaan kebutuhan iptek; b) merumuskan kebijakan iptek sesuai dengan potensi keunggulan daerah , c) menentukan prioritas utama dan perangkat kepentingan permasalahan riset dan iptek .
2. DRD secara proaktif memberikan saran/gagasan pengembangan potensi daerah yang berpeluang untuk meningkatkan pendapatan daerah;
3. DRD merupakan inisiator dan akselerator pembangunan iptek yang mempunyai posisi dan peran strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan iptek di daerah.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Fasilitasi DRD Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan oleh Bidang Litbang Kabupaten Magelang berupa :

1. Riset Unggulan Daerah

Dilaksanakan lomba Riset Unggulan Daerah dengan tema :

- a. Penanggulangan Kemiskinan
- b. Pendidikan
- c. Kesehatan
- d. Lingkungan Hidup
- e. Pengembangan Sektor unggulan (Pertanian, Pariwisata dan UMKM)

2. Publikasi Hasil Penelitian di Kabupaten Magelang:

- Mengkopilasi dan memilih hasil penelitian/ kajian di Kabupaten Magelang untuk di publikasi.
- Diterbitkan 1 kali dalam setahun
- Sebagai cikal bakal penyusunan jurnal penelitian di Kabupaten Magelang

3. Kajian Kebijakan.

- Kajian terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Magelang.
- Kajian kebijakan sesuai dengan perintah pimpinan

4. Menyusun laporan Kegiatan Fasilitasi Dewan Riset Daerah tahun 2019

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi DRD Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Riset Unggulan Daerah (RUD):

- a. Tahap persiapan: Penyusunan SK Tim Pelaksana Kegiatan, SK Juri Riset Unggulan Daerah : Bulan Januari - Februari 2019
- b. Pelaksanaan seleksi : pengumuman, sosialisasi, seleksi administrasi dan substansi, pengumuman calon pemenang, penetapan pemenang, penandatanganan perjanjian kerjasama : Bulan Maret -- Juni 2019
- c. Pelaksanaan penelitian : Juli – September 2019

2. Publikasi Hasil Penelitian di Kabupaten Magelang:

Kompilasi data sampai dengan penerbitan buku : Bulan Juli – November 2019

3. Kajian Kebijakan dirumuskan pada bulan Mei - Oktober 2019

4. Menyusun laporan Kegiatan Fasilitasi Dewan Riset Daerah tahun 2019 : Bulan Desember 2019

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Fasilitasi DRD Tahun 2019 sebesar Rp.313.106.000,00.- (Tiga ratus tiga belas juta seratus enam ribu rupiah) dengan rincian triwulan sebagai berikut:

Triwulan I : Rp 10.460.300,-

Triwulan II : Rp. 117.730.000,-

Triwulan III : Rp. 76.005.000,-

Triwulan IV : Rp. 108.910.700,-

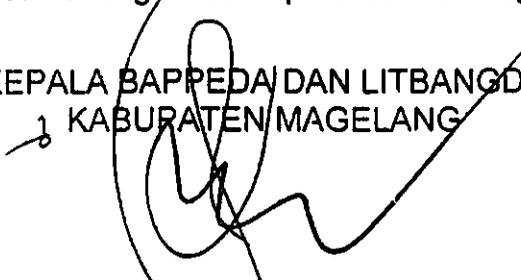
V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PERBULAN

BULAN	TARGET FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		KETERANGAN
		Rp	%	
Januari	0	0	0	
Februari	0.5	2.550.000	0,81	
Maret	3	10.460.300	3,34	
April	18	59.360.000	18,96	
Mei	26	84.450.000	26,97	
Juni	40	128.190.300	40,94	
Juli	48	154.320.300	49,29	
Agustus	58	181.945.300	58,11	
September	65	204.195.300	65,22	
Oktober	97	303.754.300	97,01	
November	99	310.404.300	99,14	
Desember	100	313.105.000	100,00	

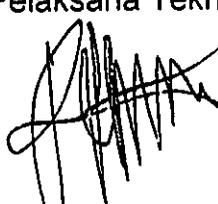
VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Fasilitasi DRD tahun 2019 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA
KABUPATEN MAGELANG


Drs. SUGIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, 2 Januari 2019
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,


RIVIA ATMARULINA, S.Pi., MPA
Penata Tk I
NIP. 19690501 200312 2 006

**RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN FASILITASI KELITBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

I. PENDAHULUAN

Pemerintah termasuk di dalamnya pemerintah daerah harus berupaya terus-menerus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat ini dapat diupayakan secara teknokratis melalui perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik salah satu indikatornya muncul dari hasil penelitian.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan, bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Tugas Bidang Litbang diantaranya adalah menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan pelayanan bidang penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu pada Tahun 2019 ini Bidang Litbang memberikan fasilitasi kepada para peneliti dan melakukan kajian terhadap pendapatan serta penyusunan Rencana Induk Kelitbangan.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Fasilitasi Kelitbangan di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh Bidang Litbang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA dan LITBANGDA) Kabupaten Magelang berupa fasilitasi bagi para peneliti, kajian pendapatan dan penyusunan Rencana Induk Kelitbangan :

1. Rapat Tim dan stake holder, dengan target:
 - Rapat Tim Kajian Pendapatan selama 5 kali
 - Rapat Tim Rencana Induk Kelitbangan selama 5 kali.
2. FGD (foccus group disccution) Tim Peneliti dengan stake holder, dengan target 2 (dua) kali, sebanyak 35 orang.
3. Seminar pendidikan, dengan target 2 (dua) kali dengan jumlah peserta masing-masing 100 orang.
4. Tersusunnya Kajian Pendapatan dan rencana Induk Kelitbangan 2019-2024
5. Terlayaninya mahasiswa yang melakukan penelitian di Kabupaten Magelang.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi kelitbangan di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Rapat Tim Peneliti dan stake holder, dilakukan sebanyak 6 (tujuh) kali, pada bulan ,Februari, Maret dan April. Mei Juni dan Juli 2019.
2. FGD pada bulan Mei dan Juni 2019
3. Seminar pada bulan Juli 2019
4. Pekerjaan selesai pada bulan Oktober 2019.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Kegiatan Fasilitasi Kelitbangan sebagaimana teruang dalam DPA 2019 sejumlah Rp 751.620.000,00 dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut:

-	Triwulan I	:Rp 14.696.750,-
-	Triwulan II	:Rp 51.375.000,-
-	Triwulan III	:Rp 666.550.000,-
-	<u>Triwulan IV</u>	<u>: Rp 18.998.250,-</u>
	JUMLAH	:Rp.751.620.000,-

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Rencana prosentase target fisik dan keuangan per bulan Kegiatan Fasilitasi Kelitbangan di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

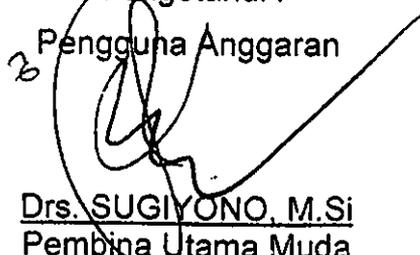
Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan %
		Rp	%	
Januari	0,00	0	0,00	0,00
Februari	5,00	0	0	0,00
Maret	10,00	14.696.750,00	1,96	0,00
April	20,00	39.921.750	5,31	0,00
Mei	30,00	54.296.750	7,22	0,00
Juni	35,00	66.071.750	8,79	0,00
Juli	40,00	83.446.750	11,10	0,00
Agustus	50,00	96.571.750	12	0,00
September	80,00	732.621.751	97,47	0,00
Oktober	90,00	743.480.000	98,92	0,00
Nopember	100,00	749.620.000	99,73	0,00
Desember	100,00	751.620.000	100	0,00

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Fasilitas Kelitbangan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Mengetahui :

Pengguna Anggaran



Drs. SUGIYONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, Januari 2019

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



AGUS WIDODO, S.ST

Penata

NIP. 19730925 199703 1002

RENCANA KERJA OPERASIONAL
FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN PERUMAHAN
TAHUN ANGGARAN 2019

I. PENDAHULUAN

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan tahun anggaran 2019 di Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang dilaksanakan guna mendukung misi ketiga RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2014-2019 yaitu meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, yang dalam sasaran keduanya adalah terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak dan lingkungan sehat, berkurangnya permukiman kumuh dan tersedianya sarana air bersih yang mendukung kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor, bukan hanya terkait dengan pembangunan rumah tinggal akan tetapi terkait dengan berbagai sarana pendukung mulai dari penyediaan infrastruktur transportasi, penyediaan air bersih, sanitasi, sarana ekonomi dan sarana lainnya.

Pemerintah pusat mencanangkan program sejuta rumah untuk mengatasi hunian di Indonesia bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), program ini merupakan salah satu program pemerintah untuk dapat mengatasi backlog atau kekurangan kepemilikan rumah untuk rumah tangga MBR.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa salah satu hal khusus yang diatur dalam undang-undang ini adalah keberpihakan negara terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam kaitan ini, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah itu, dengan memberikan kemudahan, berupa pembiayaan, pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum, keringanan biaya perizinan, bantuan stimulan, dan insentif fiskal.

Dengan kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan dilaksanakan dengan tujuan untuk memfasilitasi stake holder perumahan guna melaksanakan penyelenggaraan pengembangan perumahan di Kabupaten Magelang melalui pendanaan dari APBD Kabupaten Magelang, APBD Provinsi Jawa Tengah maupun APBN.

Selain kegiatan fasilitasi perumahan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, terdapat kegiatan penyusunan masterplan penataan gedung kantor di kawasan kompleks setda Kabupaten Magelang. Hal ini didasari dengan kondisi perkembangan Organisasi Perangkat Daerah. Guna meningkatkan pelayanan pemerintahan perlu dilakukan penataan dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan kompleks setda Kabupaten Magelang. Output dari penyusunan masterplan ini adalah terwujudnya dokumen perencanaan penataan gedung kantor yang nantinya dapat ditindaklanjuti sebagai acua dalam pembangunan dan penataan gedung perkantoran.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang berupa.

1. Pembentukan Tim/Panitia Pelaksanaan kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan tahun 2019.
2. Monitoring dan Evaluasi capaian kegiatan pembangunan dan pengembangan perumahan 2019
3. Identifikasi kegiatan pendukung pengembangan perumahan dari APBD, APBD Prov, dan APBN
4. Penyusunan data Perumahan di Kab. Magelang
5. Koordinasi dengan SKPD teknis dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan target pembangunan 5 tahun kedepan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman.
6. Pelaksanaan Fasilitasi Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni tahun 2019 dari seluruh sumber anggaran, meliputi:
 - a. BSPS
 - b. DAK Perumahan
 - c. Bankeu Provinsi RTLH
 - d. Hibah/Bansos RTLH APBD Kabupaten Magelang
7. Penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni (RTLH) Tahun 2019.
8. Penyusunan Masterplan Penataan Gedung Kantor Komplek Setda Kabupaten Magelang.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN:

1. Pembentukan Tim/Panitia Pelaksanaan kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan tahun 2019 pada bulan Januari 2019.
2. Monitoring dan Evaluasi capaian kegiatan pembangunan dan pengembangan perumahan 2019 dengan melaksanakan rapat koordinasi tim teknis, pengumpulan data capaian kegiatan minimal dalam periode tribulan atau dapat dilaksanakan dalam rapat koordinasi insidentil.
3. Identifikasi kegiatan pendukung pengembang perumahan dari APBD, APBD Provinsi dan APBN, dilaksanakan dengan mengikuti rakor dan konsultasi ke kementerian PUPR, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah dan Bappeda dan Litbangda Provinsi Jawa Tengah setiap triwulannya sekali yaitu pada bulan Maret, Juni, September dan Desember 2019.
4. Validasi dan finalisasi pendataan perumahan kabupaten Magelang 2019 dengan melaksanakan proses validasi data hasil pendataan pada tahun 2018, dilaksanakan bersamaan dengan menyandingkan data yang dimiliki oleh SKPD teknis atau BPS.
5. Pelaksanaan fasilitasi Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dengan melaksanakan Persiapan teknis pada awal tahun yaitu di bulan Januari dan Februari 2019, Sosialisasi pada bulan Februari dan Maret 2019, dan Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan Pembangunan Rumah tidak layak huni dilaksanakan setiap bulan dari bulan Februari sd Desember 2019. Pengumpulan data capaian kegiatan urusan perumahan tahun semester pertama tahun 2019 pada bulan Januari sd Juni 2019 dan capaian kegiatan urusan perumahan tahun semester kedua tahun 2019 pada bulan Juli sd Desember 2019.
6. Penyusunan Rencana kegiatan 2019 dengan pembahasan usulan kegiatan 2018 dibahas mulai bulan Juli 2018.
7. Penyusunan KAK dan proses pemilihan penyedia jasa akan di awal Januari-Februari dengan melaksanakan rapat koordinasi dengan SKPD teknis, sehingga pada bulan Maret s.d Juni dilaksanakan pekerjaan penyusunan masterplan penataan gedung kantor.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan tahun 2019 tertuang dalam DPA sejumlah Rp.207.926.000.- (Dua ratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut:

Triwulan I (Januari s/d Maret)	: Rp.	18.448.800,00
Triwulan II (April s/d Juni)	: Rp.	35.374.000,00
Triwulan III (Juli s/d September)	: Rp.	137.223.700,00
Triwulan IV (Oktober s/d Desember)	: Rp.	16.879.500,00

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp.	%	
Januari	3%	5,662,500	2.72%	
Februari	8*	15,105,300	7.26%	
Maret	9,5%	18,448,900	8.87%	
April	13,5%	27,891,600	13.41%	
Mei	22%	44,577,700	21.44%	
Juni	26%	53,822,800	25.89%	
Juli	84%	173,928,200	83.65%	
Agustus	92%	190,614,300	91.67%	
September	93%	191,046,800	91.88%	
Oktober	97%	199,620,300	96.01%	
November	99,8%	207,493,800	99.79%	
Desember	100%	207,926,300	100%	

I. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan 2019.

Kota Mangkid, Januari 2019

Kepala Bappeda Dan Litbangda
Kabupaten Magelang

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Drs. SUGIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640102 198405 1 004

ARIF YULIANTO, ST
Penata
NIP. 198107022005011009

RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN FASILITASI SIBERMAS DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019.

I. PENDAHULUAN

Kegiatan Fasilitasi dan pengabdian masyarakat dilatarbelakangi berbagai permasalahan yang eksis di masyarakat, antara lain: (1) ketidakmampuan sebagian besar masyarakat terhadap pembangunan kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat dalam era globalisasi; (2) Ipteks perguruan tinggi belum secara sengaja ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat; (3) potensi masyarakat maupun sumber daya alam lingkungannya belum termanfaatkan dengan baik dan arif, serta 4) penatakelolaan fisik kewilayahan yang belum proporsional dan profesional.

Tujuan kegiatan Sibermas adalah untuk meningkatkan kemandirian, kenyamanan kehidupan, sekaligus kesejahteraan masyarakat melalui keterlibatan aktif publik (inisiatif dan partisipatif), Pemerintah Daerah (berbasis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan perguruan tinggi (kepakaran), serta untuk menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi pemerintah daerah, masyarakat serta secara langsung atau tidak langsung berpotensi mempengaruhi kenyamanan kehidupan masyarakat.

Kegiatan Fasilitasi Sibermas dan Pengabdian Masyarakat dilaksanakan dengan menggandeng perguruan tinggi mitra di Jawa Tengah dan DIY

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Adapun rencana umum kegiatan Fasilitasi Sibermas dan Pengabdian Masyarakat di Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang berupa :

1. Pertemuan/rapat dengan mengundang perguruan tinggi mitra dalam rangka merumuskan kegiatan pelatihan di masyarakat yang akan dilaksanakan di Kab. Magelang;
2. Bappeda dan Litbanagda melalui kegiatan Fasilitasi Sibermas dan Pengabdian Masyarakat akan memfasilitasi pelatihan di masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi mitra. Kegiatan dilaksanakan di desa di Kabupaten Magelang;
3. Pelatihan akan dilaksanakan pada Bulan Maret sd. September Tahun 2019,;
4. Melakukan pendampingan di lokasi pelatihan;

5. Menjadi nara sumber pelatihan;
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelatihan;
7. Memfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat (KKN) di Kabupaten;
8. Menjadi narasumber pembekalan KKN;
9. Melakukan monitoring kegiatan KKN di Kabupaten Magelang.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Sibermas dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan Sibermas pada minggu I Bulan Januari 2019;
2. Membuat SK Tim Fasilitasi Sibermas pada minggu I dan II Bulan Januari 2019;
3. Rapat dengan perguruan tinggi mitra pada bulan Januari dan Februari 2019;
4. Melaksanakan rapat koordinasi tim Bulan Januari dan Februari 2019;
5. Melaksanakan pelatihan kepada masyarakat di desa di Kabupaten Magelang pada Bulan Maret sd. Juni Tahun 2019;
6. Membuat surat rekomendasi izin pengabdian masyarakat (KKN) perguruan tinggi yang akan melaksanakan KKN di wilayah Kabupaten Magelang (waktu tentatif);
7. Melaksanakan pembekalan KKN bagi perguruan tinggi yang akan melaksanakan KKN di Wilayah Kabupaten Magelang (waktu tentatif);
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelatihan Sibermas pada Bulan Juni dan Desember Tahun 2019;
9. Melakukan kaji banding ke beberapa kabupaten/kota di wilayah DIY/Jawa Tengah dalam rangka mempertajam pengetahuan terkait kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan perguruan tinggi;
10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi KKN Tahun 2019 (waktu tentatif);
11. Melaksanakan rapat evaluasi Kegiatan Sibermas dan Pengabdian Masyarakat.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Fasilitasi Sibermas dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tertuang dalam DPA sejumlah Rp. 126.495.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut :

- Januari : 5.267.000,-
- Februari : -
- Maret : 18.582.500,-
- April : -
- Mei : 26.806.500,-
- Juni : 13.152.500,-
- Juli : 33.200.000,-
- Agustus : -
- September : -
- Oktober : -
- November : 29.486.500,-
- Desember : -

V. TARGET PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp	%	
Januari	5	5.267.000,	4,20%	
Februari	10	5.267.000,	4,20%	
Maret	20	23.849.500,	19%	
April	30	23.849.500,	19%	
Mei	50	50.656.000,	40%	
Juni	60	63.808.500,	50%	
Juli	70	97.008.500,	77%	
Agustus	85	97.008.500,	77%	
September	90	97.008.500,	77%	
Oktober	90	97.008.500,	77%	
November	95	126.495.000,	100%	
Desember	100	126.495.000,	100%	

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Fasilitasi Sibermas dan Pengabdian Masyarakat Kabupaten Magelang TA 2019 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Mengetahui
Pengguna Anggaran



Drs. SUGYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, Januari 2019
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. BASUKI ROCHMAD
Penata Tk I
NIP. 19680723 199403 1 010

RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI
PENINGKATAN KINERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

I. PENDAHULUAN

Air minum dan sanitasi yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, penyediaan air minum dan sanitasi merupakan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Pemerintah Pusat memiliki peran penting khususnya dalam rangka pencapaian sasaran nasional dan pengendalian pelaksanaan untuk perwujudan standar pelayanan minimal.

Berdasarkan data Bappeda Kabupaten Magelang tahun 2018, cakupan layanan air minum di Kabupaten Magelang masih mencapai 83.89%, sedangkan cakupan akses sanitasi 86.28%, target tersebut diperoleh dengan membandingkan capaian layanan terhadap jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Magelang, yaitu dengan data jumlah KK dan jiwa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Magelang. Adapun sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019 diharapkan cakupan ini dapat meningkat menjadi 100% untuk air minum dan 100% untuk sanitasi.

Fasilitasi dan koordinasi peningkatan Kinerja Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) tahun 2018, merupakan rangkaian kegiatan tahun sebelumnya dalam rangka mendukung percepatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi guna merealisasikan *universal acces* terutama untuk sektor air minum dan sanitasi berupa 100% akses masyarakat terhadap air minum aman dan 100% akses masyarakat terhadap sanitasi layak. Amanat dalam Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga mengamanatkan kewajiban pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pokok air minum dan penyediaan layanan pengoahan air limbah domestik. Hal ini menjadi target dalam keberhasilan yang didukung dengan kinerja Kelompok Kerja AMPL.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kinerja Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang berupa:

1. Pembentukan Kelompok Kerja Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL);
2. Memfasilitasi Pokja AMPL dalam melakukan koordinasi dan menyusun perencanaan pembangunan terkait program penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan;
3. Memfasilitasi Pokja AMPL dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan;
4. Pelaksanaan Fasilitasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS);
5. Pembentukan Panitia Kemitraan PAMSIMAS;
6. Penyusunan daftar panjang desa rawan air bersih dan daftar pendek usulan kegiatan air bersih melalui Pamsimas ke pusat.
7. Pelaksanaan Fasilitasi Program *Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene* Penyehatan Lingkungan untuk Semua (*IUWASH PLUS*));
8. Evaluasi dan Penyusunan rencana kegiatan terkait target pembangunan jangka menengah bidang AMPL.

III. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan:

1. Penyusunan RKO, jadwal pelaksanaan kegiatan dan rencana anggaran kas pada bulan Januari 2019.
2. Membentuk Kelompok Kerja AMPL 2019, dan Panitia Kemitraan 2019 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Magelang pada bulan Januari s/d Maret 2019.
3. Melakukan proses perekrutan *supporting staff* pada bulan Februari 2019
4. Penyusunan daftar panjang desa rawan air bersih pada bulan Pebruari s/d Mei 2019 dan daftar pendek usulan kegiatan air bersih melalui Pamsimas ke pusat pada bulan Juli-Nopember 2019.

5. Sosialisasi kegiatan bidang AMPL pada bulan April dan Juli 2018.
6. Rapat koordinasi anggota Pokja AMPL pada bulan Februari s/d Nopember 2019.
7. Rapat koordinasi anggota Panitia Kemitraan pada bulan Maret s/d Nopember 2019.
8. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan kegiatan AMPL tahun anggaran 2019 pada bulan Februari s/d Desember 2019.
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan AMPL pada bulan Februari s/d April dan bulan September s/d November 2019.
10. Penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran kegiatan AMPL tahun 2020.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Fasilitas Peningkatan Kinerja Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) tahun 2019 tertuang dalam DPA sejumlah Rp.142,045,150,- (Seratus enam puluh dua juta empat puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut:

Triwulan I (Januari s/d Maret)	: Rp.	41,204,250
Triwulan II (April s/d Juni)	: Rp.	61,115,900
Triwulan III (Juli s/d September)	: Rp.	21,925,800
Triwulan IV (Oktober s/d Desember)	: Rp.	17,799,200

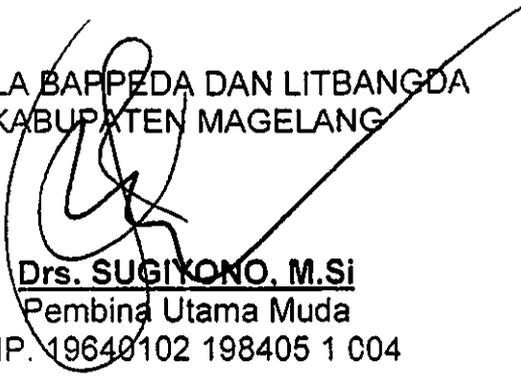
V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp.	%	
Januari	3	3,650,800	2.57%	
Februari	12	16,898,300	11.90%	
Maret	30	41,204,250	29.01%	
April	37	52,195,050	36.75%	
Mei	45	62,795,850	44.21%	
Juni	73	102,320,150	72.03%	
Juli	81	113,792,650	80.11%	
Agustus	84	119,190,150	83.91%	
September	88	124,245,950	87.47%	
Oktober	94	133,196,750	93.77%	
November	97	137,593,950	96.87%	
Desember	100	142,045,150	100.00%	

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kinerja Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) tahun 2019 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA
KABUPATEN MAGELANG


Drs. SUGIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, Januari 2019


PTK
ARIF YULIANTO, ST
Penata
NIP. 19810702 200501 1 009

**RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN PENYUSUNAN KUA PPAS
BAPPEDA DAN LITBANGDA KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

I. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Memperhatikan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan yang selanjutnya dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS antara Pimpinan DPRD dan Bupati. Selanjutnya KUA PPAS ini akan dijadikan dasar dalam penyusunan RAPBD.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Penyusunan KUA PPAS Tahun Anggaran 2019 mempunyai indikator keluaran tersusunnya KUA PPAS TA.2020 dan KUPA PPAS Perubahan TA. 2018.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Bulan	Uraian
1	Januari	
2	Februari	
3	Maret	
4	April	
5	Mei	Penyusunan surat edaran KUA PPAS TA. 2020; Penyusunan Rancangan KUA PPAS TA. 2020
6	Juni	Pembahasan Rancangan KUA PPAS TA. 2020 dengan TAPD, penyampaian KUA PPAS TA. 2020 pada Bupati dan DPRD; Penyusunan Edaran KUPA PPAS Perubahan 2019
7	Juli	Pembahasan Rancangan KUA PPAS dengan DPRD; MoU KUA PPAS TA. 2020

No	Bulan	Uraian
8	Agustus	MoU KUPA PPAS Perubahan TA 2019; cetak KUA PPAS TA.2020 dan KUPA PPAS Perubahan TA. 2019
9	September	
10	Oktober	
11	November	
12	Desember	

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Rencana penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Triwulan II : Rp. 55.904.000; digunakan untuk belanja alat tulis kantor, belanja penggandaan serta beianja makanan dan minuman rapat
2. Triwulan III : Rp. 965.248.000; digunakan untuk honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja cetak, penggandaan dan penjilidan, belanja makanan dan minuman rapat serta belanja perjalanan dinas dalam daerah.

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp.	%	
Januari	5	0	0	
Februari	5	0	0	
Maret	5	0	0	
April	7	1.431.000	0,14	
Mei	10	1.431.000	0,14	
Juni	50	55.904.000	5,47	
Juli	70	507.904.000	49,74	
Agustus	85	568.392.000	55,66	
September	100	1.021.152.000	100	
Oktober	100	1.021.152.000	100	
November	100	1.021.152.000	100	
Desember	100	1.021.152.000	100	

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Penyusunan KUA PPAS Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA
KABUPATEN MAGELANG

Drs. SUGIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, Januari 2019

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

ENDANG RAHAYU Q. SE, MM
Penata Tingkat I
NIP. 1971011 200501 2 008

**RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN PENYUSUNAN RPJMD
BAPPEDA DAN LITBANGDA KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Magelang merupakan salah satu dari 7 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 Juni 2018. Secara politis pemilihan kepala daerah akan berdampak pada pergantian pimpinan daerah dan berpengaruh pada arah pembangunan daerah Kabupaten Magelang selama lima tahun mendatang, yang akan termuat dalam dokumen RPJMD Tahun 2019-2024. Sebagai rencana jangka menengah, RPJMD 2019-2024 merupakan bagian dari tahapan pembangunan jangka panjang yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025. Oleh karena itu penyusunan dokumen RPJMD 2019-2024 yang merupakan penjabaran dari visi misi kepala daerah terpilih harus mengacu pada RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025.

Mempedomani Permendagri 86 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 47 bahwa Penyusunan rancangan awal RPJMD dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. Penyusunan rancangan awal RPJMD merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.

Tahapan penyusunan selanjutnya adalah penyusunan Rancangan RPJMD dan Rancangan Akhir RPJMD yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Penyusunan RPJMD Tahun Anggaran 2019 mempunyai output tersusunnya Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Penyusunan RPJMD Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

No	Bulan	Uraian
1	Januari	Penyusunan jadwal tahapan penyusunan RPJMD dan Renstra PD, pembntukan tim penyusun, Penyusunan Draft Rancangan Awal RPJMD
2	Februari	Penyusunan Draft Rancangan Awal RPJMD
3	Maret	Penyusunan Rancangan Awal RPJMD
4	April	Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD
5	Mei	Pembahasan dan penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal RPJMD; pelaksanaan konsultasi gubernur
6	Juni	Penyusunan Rancangan RPJMD, musrenbang RPJMD, Penyusunan Rancangan Akhir
7	Juli	Penyampaian Rancangan Perda
8	Agustus	Pengajuan Evaluasi Raperda RPJMD ke Gubernur
9	September	Penetapan Perda RPJMD
10	Oktober	Penetapan Perbup Renstra PD
11	November	
12	Desember	

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Rencana penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Triwulan I : Rp. 158.243.000; digunakan untuk belanja ATK, belanja makanan dan minuman rapat dan belanja perjalanan luar daerah.
2. Triwulan II : Rp. 374.328.000; digunakan untuk belanja dokumentasi dan dekorasi, belanja transportasi dan akomodasi, belanja cetak, belanja penggandaan, belanja penjilidan, belanja sewa mobilitas darat, belanja sewa peralatan dan perlengkapan kantor, belanja makanan dan minuman rapat, belanja tenaga ahli/ instruktur /narasumber dan belanja perjalanan luar daerah.
3. Triwulan III : Rp. 63.520.000; digunakan untuk belanja makanan dan minuman rapat, belanja tenaga ahli/ instruktur /narasumber, belanja perjalanan dalam dan luar daerah.
- IV. Triwulan IV : Rp. 1.147.280.000; digunakan untuk belanja honorarium tim; belanja cetak, penggandaan dan penjilidan; belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas luar daerah.

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp.	%	
Januari	3	40.000.000	2,29	
Februari	8	132.450.000	7,60	
Maret	10	158.243.000	9,08	

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp.	%	
April	13	219.555.000	12,59	
Mei	30	513.571.000	29,46	
Juni	32	532.571.000	30,55	
Juli	32	532.571.000	30,55	
Agustus	35	596.091.000	34,19	
September	35	596.091.000	34,19	
Oktober	100	1.7433.71.000	100	
November	100	1.743.371.000	100	
Desember	100	1.743.371.000	100	

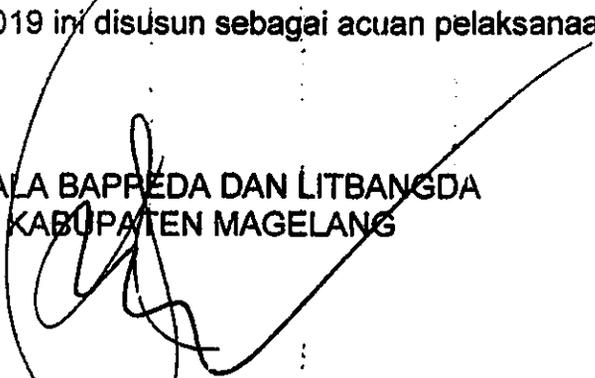
VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Penyusunan RPJMD Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Kota Mungkid, Januari 2019

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA
KABUPATEN MAGELANG

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Drs. SUGIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640102 198405 1 004


ENDANG RAHAYU Q. SE, MM
Penata Tingkat I
NIP. 1971011 200501 2 008

**RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN PERENCANAAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPEDA DAN LITBANGDA KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

I. PENDAHULUAN

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pasal 5 ayat (3) menjelaskan, bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2020 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa, kecamatan, Rapat Teknis, Forum SKPD, Forum Rumpun SKPD, dan Musrenbang Kabupaten.

Selain penyusunan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2020, pada Tahun 2019 akan disusun pula Perubahan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2019 mempunyai output berupa RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2020 dan Perubahan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

No	Bulan	Uraian
1	Januari	Penyusunan Rancangan Awal RKPD; Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD; Menyusun Surat Bupati Magelang tentang Penyampaian Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 sebagai bahan penyusunan Rancangan Renja PD Tahun 2020, fasilitasi musrenbang kecamatan dan Rapat Teknis
2	Februari	Verifikasi Rancangan Renja PD; Forum SKPD; Pengajuan usulan kegiatan pusat dan provinsi.

No	Bulan	Uraian
3	Maret	Forum Rumpun SKPD; Penyusunan Rancangan RKPD; Musrenbang Kabupaten, menyusun usulan dana perimbangan
4	April	Desk Rancangan Akhir RKPD dengan SKPD; Penyusunan Rancangan Akhir Renja PD, evaluasi oleh APIP
5	Mei	Penetapan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2020; Desk Rancangan Akhir Renja PD; Surat Bupati Magelang tentang penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2019
6	Juni	Peraturan Bupati tentang Penetapan Renja PD
7	Juli	Penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD 2019;
8	Agustus	Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Renja PD 2019
9	September	Persiapan Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
10	Oktober	Persiapan Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
11	November	Persiapan Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
12	Desember	Persiapan Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Rencana penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Triwulan I : Rp. 467.602.000; digunakan untuk Honorarium PNS dan non PNS, belanja ATK, belanja dekomendasi/dekorasi, belanja transportasi /akomodasi, belanja bahan material lainnya, belanja cetak, penggandaan, penjiilidan; belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja sewa sarana mobilitas darat, belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber, belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah, belanja makanan dan minuman rapat.
2. Triwulan II : Rp. 427.930.000; digunakan untuk honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja cetak, penggandaan, penjiilidan; belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan luar daerah serta belanja jasa konsultasi lainnya.
3. Triwulan III : Rp. 105.505.000; digunakan untuk belanja cetak, penggandaan dan penjiilidan, belanja makanan dan minuman rapat serta belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah.
4. Triwulan IV : Rp. 53.950.000; digunakan belanja makanan dan minuman rapat serta belanja perjalanan dinas luar daerah.

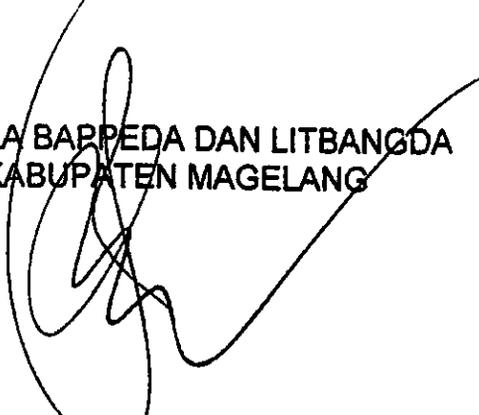
V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp.	%	
Januari	10	5.250.000	0,49	
Februari	20	112.450.000	10,66	
Maret	45	467.602.000	44,32	
April	50	497.602.000	47,17	
Mei	80	844.452.000	80,04	
Juni	85	895.532.000	84,88	
Juli	95	998.837.000	94,68	
Agustus	95	1.001.037.000	94,87	
September	95	1.001.037.000	94,87	
Oktober	97	1.017.927.000	96,49	
November	100	1.054.987.000	100	
Desember	100	1.054.987.000	100	

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA
KABUPATEN MAGELANG


Drs. SUGIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, Januari 2019
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


ENDANG RAHAYU Q. SE. MM
Penata Tingkat I
NIP. 1971011 200501 2 008

**RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN EVALUASI RKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**

I. PENDAHULUAN

Evaluasi hasil rencana pembangunan daerah merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa Menteri/Gubernur/ Bupati/Walikota, melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan hasil rencana pembangunan daerah.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 181 ayat (3) bahwa Bupati/Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota..

Tujuan evaluasi hasil RKPD adalah untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional. Tujuan lainnya adalah menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah, konsistensi antara dokumen perencanaan, dan kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Evaluasi hasil RKPD dilaksanakan setiap triwulan oleh Kepala Bappeda dan Litbangda dengan menggunakan hasil evaluasi Renja SKPD. Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala SKPD wajib melaksanakan Evaluasi Renja SKPD setiap triwulan dan melaporkan hasil evaluasi dimaksud kepada Kepala Bappeda dan Litbangda.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Evaluasi RKPD Tahun Anggaran 2019 merupakan evaluasi hasil RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019 yang mempunyai indikator kinerja berupa laporan hasil evaluasi RKPD setiap triwulan (I, II, III, IV). Laporan ini merupakan kompilasi dari seluruh laporan evaluasi Renja SKPD Tahun 2019. Selain itu indikator kinerja kegiatan ini juga berupa laporan sampai dengan triwulan IV evaluasi RKPD tahun sebelumnya (2018).

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Evaluasi RKPD Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan SK Bupati tentang Tim Evaluasi RKPD Tahun 2019 pada bulan Januari 2019.
2. Rapat persiapan Tim Evaluasi RKPD Tahun 2019 dihadiri Tim dari Bappeda dan Litbangda di bulan Januari sampai dengan Maret 2019.
3. Penyusunan laporan hasil Evaluasi RKPD sampai dengan Triwulan IV tahun 2018 pada bulan Januari 2019.
4. Penyusunan laporan hasil Evaluasi RKPD Triwulan I pada bulan April 2019.
5. Penyusunan laporan hasil Evaluasi RKPD Triwulan II pada bulan Juli 2019.
6. Penyusunan laporan hasil Evaluasi RKPD Triwulan III pada bulan Oktober 2019.
7. Rapat Koordinasi Tim Evaluasi RKPD dijadwalkan selama 6 kali selama bulan Januari s.d. Desember 2019 dan Rapat Koordinasi dengan SKPD sebanyak 4 kali selama bulan Maret – Desember 2019.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Evaluasi RKPD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dialokasikan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda dan Litbangda sejumlah Rp. 128.952.000,- dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut:

Triwulan I	: Rp. 26.101.900,-
Triwulan II	: Rp. 40.596.800,-
Triwulan III	: Rp. 36.276.800,-
Triwulan IV	: Rp. 25.976.500,-

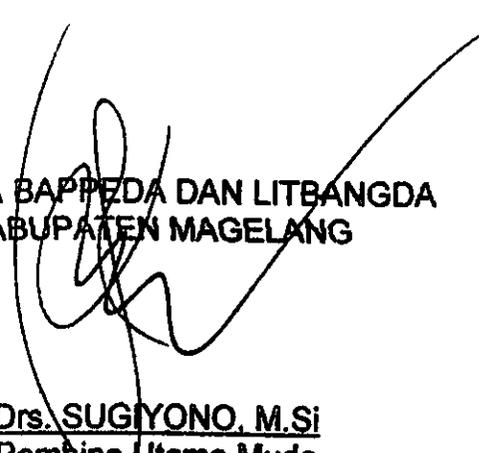
V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PERBULAN

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp.	%	
Januari	2	0	0	
Pebruari	10	0	0	
Maret	21	26.101.900	20,24	
April	35	17.500.900	13,57	
Mei	40	0	0	
Juni	52	23.095.900	17,91	
Juli	62	13.180.900	10,22	
Agustus	65	0	0	
September	80	23.095.900	17,91	
Oktober	82	2.880.900	2,23	
November	90	0	0	
Desember	100	23.095.600	100	

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Evaluasi RKPD Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA
KABUPATEN MAGELANG


Drs. SUGIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, Januari 2019
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


SRI PUJIYATI WIJININGSIH, S.Sos., MM
Pembina
NIP.19720104 199603 2 002

RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

I. PENDAHULUAN

Memasuki 2019, perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah 2020. Penyusunan ini sebelumnya telah diawali dengan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Desember 2018. Mengingat saat ini sedang dalam proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2018 maka penyusunan Renja Perangkat Daerah 2020 memedomani Rancangan RPJMD Teknokratik 2019-2024 yang disempurnakan.

Selain penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2020, pada 2019 juga disusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2019 yang mendasarkan pada evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan pertengahan 2019.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Penyusunan Penyusunan Rencana Kerja SKPD yang dilaksanakan oleh Subbagian Program Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang berupa :

1. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2020
2. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2019

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan pada Minggu III Januari
2. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dilaksanakan pada Minggu II Februari
3. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan pada Minggu III Februari
4. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan Minggu IV Maret
5. Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan pada Mei

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD sebagaimana tertuang dalam DPA sejumlah Rp 14.627.000,00 dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut:

- Triwulan I : Rp 12.322.000,00
 - Triwulan II : Rp 2.245.000,00
 - Triwulan III : Rp 60.000,00
 - Triwulan IV : Rp : 0,00
- JUMLAH : Rp 14.627.000,00

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp.	%	
Januari	1	60.000,00	0,41	
Februari	50	6.652.000,00	45,48	
Maret	85	12.322.000,00	84,24	
April	85	12.322.000,00	84,24	
Mei	85	12.382.000,00	84,65	
Juni	100	14.567.000,00	99,59	
Juli	100	14.627.000,00	100,00	
Agustus	100	14.627.000,00	100,00	
September	100	14.627.000,00	100,00	
Oktober	100	14.627.000,00	100,00	
November	100	14.627.000,00	100,00	
Desember	100	14.627.000,00	100,00	

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Penyusunan Renja SKPD TA 2019 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Mengetahui
Kepala Bappeda dan Litbangda
Kabupaten Magelang

Drs. SUGIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, 2 Januari 2019
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

MIRA FATIMAH, S. Sos., M. P. A.
Penata Tingkat I
NIP 19811218 200501 2 016

RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SKPD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

I. PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah menjadi sektor yang menentukan arah perjalanan roda pemerintahan daerah, termasuk di Kabupaten Magelang. Perencanaan pembangunan daerah yang ideal adalah perencanaan yang didasarkan pada hasil penelitian dan pengembangan daerah.

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan terutama oleh aparat pemerintah sebagai pengemban amanat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya guna menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Perencanaan pembangunan daerah yang didukung dengan hasil-hasil penelitian dan pengembangan daerah diharapkan mampu menggambarkan permasalahan pembangunan daerah berbasis realita yang terjadi di masyarakat. Kesenjangan yang terjadi berdasarkan kajian penelitian dan pengembangan merupakan permasalahan pembangunan yang harus dipecahkan dan diselesaikan. Tahapan penyelesaian permasalahan pembangunan diawali dengan menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah).

Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang maka perlu disusun perencanaan strategis berdasarkan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Renstra Bappeda dan Litbangda merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun, di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbangda sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan, serta bersifat indikatif. Selain itu juga memberikan gambaran perwujudan pelayanan Bappeda selama 5 (lima) tahun ke depan, serta merupakan bagian kontrak kerja Kepala Bappeda dan Litbangda dengan Kepala Daerah. Mengingat dokumen ini disusuri pada pertengahan periode perencanaan maka Renstra ini hanya memuat perencanaan strategis pada sisa periode perencanaan berjalan.

Proses penyusunan Renstra Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak perubahan organisasi perangkat daerah. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Bappeda dan Litbangda Tahun 2019 - 2024 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Penyusunan Penyusunan Rencana Strategis SKPD yang dilaksanakan oleh Subbagian Program Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang berupa :

1. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah 2019-2024
2. Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2019-2024
3. Pelaksanaan Forum Rencana Strategis Perangkat Daerah 2019-2024
4. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah 2019-2024
5. Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2019-2024

Keluaran dari kegiatan ini adalah dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Bappeda dan Litbangda 2019-2024.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis SKPD adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah 2019-2024
2. Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2019-2024
3. Pelaksanaan Forum Rencana Strategis Perangkat Daerah 2019-2024
4. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah 2019-2024
5. Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2019-2024

Pelaksanaan menyesuaikan agenda penyusunan RPJMD 2019-2024.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis SKPD sebagaimana tertuang dalam DPA sejumlah Rp 12.858.000,00 dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut:

- Triwulan I : Rp 1.387.000,00
- Triwulan II : Rp 6.245.500,00
- Triwulan III : Rp 5.225.500,00
- Triwulan IV : Rp 0,00
- JUMLAH : Rp 12.858.000,00

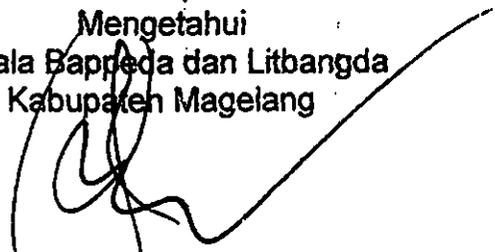
V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp.	%	
Januari	0	0,00	0,00	
Februari	15	1.387.000,00	10,79	
Maret	15	1.387.000,00	10,79	
April	15	1.417.000,00	11,02	
Mei	30	3.392.500,00	26,38	
Juni	60	7.632.500,00	59,36	
Juli	60	7.632.500,00	59,36	
Agustus	90	11.182.500,00	86,97	
September	100	12.858.000,00	100,00	
Oktober	100	12.858.000,00	100,00	
November	100	12.858.000,00	100,00	
Desember	100	12.858.000,00	100,00	

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD TA 2019 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Mengetahui
Kepala Bappeda dan Litbangda
Kabupaten Magelang


Drs. SUGIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, 2 Januari 2019
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


MIRA FATIMAH, S. Sos., M. P. A.
Penata Tingkat I
NIP 19811218 200501 2 016

**RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN EVALUASI RPJMD
BAPPEDA DAN LITBANGDA KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

I. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 275-277 diamanatkan bahwa pemerintah wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang meliputi: (a) pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; (b) pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan (c) evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah. Melalui evaluasi akan diketahui kesesuaian kebijakan dokumen rencana pembangunan dengan dokumen perencanaan terkait, kesesuaian pelaksanaan rencana pembangunan, dan seberapa besar pencapaian kinerja pembangunan daerah. Hasil evaluasi rencana pembangunan daerah akan menjadi acuan dalam penentuan rencana pembangunan daerah berikutnya agar dapat mengarah pada pencapaian tujuan, sasaran dan hasil pembangunan sesuai dengan perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.

Sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 evaluasi rencana pembangunan daerah terdiri atas: (1) Evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan; (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan; dan (3) evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. Evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan dilakukan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah; keselarasan antar dokumen perencanaan; dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan mencakup pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Sementara itu evaluasi terhadap hasil pembangunan mencakup capaian berbagai target indikator yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan.

Secara teknis berkaitan dengan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah diatur dalam Pasal 300 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa Hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD kabupaten/kota untuk periode berikutnya.

Berkaitan dengan evaluasi hasil RPJMD Kabupaten/kota, lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 299 Permendagri Nomor 86 tahun 2017 bahwa:

- 1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD lingkup Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota.
- 2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD lingkup Daerah kabupaten/kota.
- 3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD kabupaten/kota dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD kabupaten/kota; dan
 - b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten/kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan jangka menengah Daerah provinsi.
- 4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/kota.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

RPJMD Kabupaten Magelang telah dilaksanakan melalui RKPD dan APBD yang ditetapkan setiap tahunnya. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 akan berakhir. Pada tahun 2019 dengan dilantikannya Bupati Magelang terpilih, maka Kabupaten Magelang akan menyusun RPJMD periode tahun 2019-2024. Sehubungan hal tersebut sesuai amanat Pasal 300 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tersebut diatas maka Bappeda dan Litbangda mempunyai kewajiban melaksanakan Evaluasi RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019.

Kegiatan Evaluasi RPJMD Tahun Anggaran 2019 merupakan kegiatan evaluasi dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode akhir dengan target indikator output 1 (satu) dokumen Evaluasi RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2019.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Evaluasi RPJMD Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

No	Bulan	Uraian
1	Januari	1. Persiapan :
		a. Konsolidasi awal dan orientasi
		b. Penyusunan Jadwal Tahapan dan Proses
		c. Penyusunan surat permohonan personil dan konsep SK Bupati tentang Tim Evaluasi RPJMD Tahun 2019
		d. Proses SK Tim penyusunan Evaluasi RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024
		2. Penyusunan Rancangan Evaluasi RPJMD :
		a. Penetapan sistematisika dan tools evaluasi
		b. Penyusunan rancangan evaluasi RPJMD
2	Februari	c. FGD
		d. Penyempurnaan Rancangan Evaluasi RPJMD
		e. Penyajian Rancangan Evaluasi RPJMD
		3. Penyusunan Rancangan Akhir Evaluasi RPJMD:
		a. Perumusan Rancangan Akhir Evaluasi RPJMD
		b. Penyempurnaan Rancangan Akhir Evaluasi RPJMD
3	Maret	c. Rapat hasil akhir dengan SKPD
		d. Penyajian Akhir Evaluasi RPJMD
		4. Penyampaian hasil evaluasi RPJMD dan rekomendasinya kepada:
		a. Bupati dan untuk persetujuan Bupati terhadap hasil evaluasi RPJMD
		b. Gubernur Jawa Tengah
4	April	-
5	Mei	-
6	Juni	-
7	Juli	-
8	Agustus	-
9	September	-
10	Oktober	-
11	November	-
12	Desember	-

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Rencana penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Triwulan I : Rp. 63.621.000;
2. Triwulan II : Rp. 342.476.000; digunakan untuk honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja dekomendasi/dekorasi, belanja ATK, belanja cetak, penggandaan dan penjilidan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah, serta belanja tenaga ahli .
3. Triwulan III : Rp. 0
4. Triwulan IV : Rp. 0

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp.	%	
Januari	10	9.720.000,-	2,39	
Februari	40	11.563.000,-	2,85	
Maret	100	42.338.000,-	10,43	
April	100	342.476.000,-	84,33	
Mei	100	0,-	0	
Juni	100	0,-	0	
Juli	100	0,-	0	
Agustus	100	0,-	0	
September	100	0,-	0	
Oktober	100	0,-	0	
November	100	0,-	0	
Desember	100	0,-	0	

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Evaluasi RPJMD Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Kota Mungkid, Januari 2019

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA
KABUPATEN MAGELANG

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. SUGIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640102 198405 1 004

SRI PUJIYATI W., S.Sos, MM
Pembina
NIP. 19720104 199603 2 002

**RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI
TAHUN ANGGARAN 2019**

I. PENDAHULUAN

Perda No 7 Tahun 2014 Tentang RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 mengamanatkan bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Magelang yang Semakin SEMANAH, telah dijabarkan kedalam enam misi. Misi yang kedua adalah membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing, dengan prioritas pembangunan dititikberatkan pada pengembangan pertanian, pariwisata dan industri kecil dan menengah.

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun Anggaran 2019 dilakukan untuk membentuk sinergitas antar SKPD yang berada dibawah koordinasi Bidang Ekonomi. Hal ini berkaitan erat dengan upaya untuk menajamkan prioritas pembangunan serta pencapaian target-target kinerja SKPD Bidang Ekonomi, dan sebagai sarana diskusi dan sinergi untuk penyusunan RPJMD yang akan datang. Selain itu juga sebagai wahana untuk monitoring dan evaluasi terhadap program-program dan kegiatan SKPD lingkup bidang ekonomi.

Pada tahun 2019 ini, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dititikberatkan pada fasilitasi penyusunan Renstra OPD lingkup bidang ekonomi. Serta penyusunan perencanaan pembangunan tematik bidang ekonomi. Selain itu, dilaksanakan juga evaluasi terhadap dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada, masih layak untuk dilanjutkan atau perlu diperbarui.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berupa fasilitasi rapat koordinasi perencanaan bidang ekonomi dan monitoring evaluasi program SKPD bidang ekonomi dengan target 25 kali untuk sembilan bidang unggulan (pertanian, pangan, perikanan, UKM, pariwisata, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja dan penanaman modal).

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Rapat koordinasi perencanaan bidang ekonomi akan dilaksanakan pada bulan Januari-Desember 2019.

2. Monitoring dan evaluasi program perencanaan bidang ekonomi akan dilaksanakan pada bulan Januari-Desember 2019.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tertuang dalam DPA sejumlah Rp 144.436.000,- dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut:

- Triwulan I : Rp 17.080.000,-
- Triwulan II : Rp 36.570.000,-
- Triwulan III : Rp 47.566.000,-
- Triwulan IV : Rp 43.220.000,-
- Jumlah : Rp 144.436.000,-

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp	%	
Januari	5	2,430,000.00	2	
Februari	10	4,215,000.00	5	
Maret	20	10,435,000.00	12	
April	25	10,745,000.00	19	
Mei	30	11,865,000.00	27	
Juni	40	13,960,000.00	37	
Juli	50	16,145,000.00	48	
Agustus	65	24,776,000.00	65	
September	80	6,645,000.00	70	
Oktober	90	20,330,000.00	84	
November	95	19,245,000.00	97	
Desember	100	3,645,000.00	100	

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Mengetahui
Kepala Bappeda dan Litbangda
Kabupaten Magelang


Drs. SUGIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, Januari 2019

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Ari Tri Arti, SP, M.Ec.Dev.
Penata Tk I
NIP. 19790521 200501 2 013

RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO)
PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PEL) BERBASIS KLASTER
MELALUI PENGUATAN KELEMBAGAAN FEDEP
(FORUM FOR ECONOMIC DEVELOPMENT AND EMPLOYMENT PROMOTION)
TAHUN ANGGARAN 2019

I. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana Pemerintah Daerah dan swasta serta masyarakat (*stakeholder*) secara bersama-sama menjalin kemitraan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap kebijakan dasar yang diperlukan bagi pembangunan daerah, khususnya yang menyangkut pembangunan sarana dan prasarana, investasi dan akses terhadap sumber dana (modal), kebijakan lingkungan, pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) serta pengembangan sumberdaya manusia.

Otonomi daerah membawa implikasi mendasar terhadap keberadaan tugas, fungsi dan tanggung jawab daerah yang antara lain di bidang ekonomi yang meliputi implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antar daerah serta pencarian sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan dengan cara menggali potensi yang dimiliki oleh daerah. Oleh karena itu pembangunan ekonomi daerah sangat ditentukan oleh kebijakan daerah itu sendiri dalam menentukan sektor-sektor yang diprioritaskan untuk pertumbuhan ekonomi di daerah dengan mengoptimalkan potensi berbasis unggulan daerah.

Dalam melaksanakan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang pada Tahun 2014-2019 telah menetapkan visi "**Terwujudnya Kabupaten Magelang yang Semakin Semanah (Sejahtera, Maju dan Amanah)**". Visi tersebut akan diwujudkan melalui 6 (enam) misi, yang salah satu misinya terkait dengan pengembangan ekonomi lokal yaitu Misi Kedua: **Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing**, dengan prioritas pembangunan pada pengembangan pertanian, pariwisata dan industri kecil dan menengah.

Forum For Economic Development and Employment Promotion (FEDEP) merupakan forum dialog untuk pengembangan ekonomi dan perluasan lapangan kerja di daerah. Forum ini adalah forum kemitraan terlembaga bagi para pelaku ekonomi di daerah yang relevan, bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah melalui pemberian saran dan arahan kebijakan tentang usaha-

usaha/ kegiatan bersama berbasis potensi lokal. Dalam pelaksanaan kegiatannya, FEDEP memfasilitasi organisasi dan individu dari sektor pemerintah maupun swasta dalam mensinergikan program pengembangan ekonomi lokal di daerah agar lebih optimal, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Forum ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih yang berarti dalam upaya pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Magelang, sehingga apa yang telah dicita-citakan dalam visi pembangunan daerah dapat terwujud.

II. DASAR

- a. Peraturan Gubernur nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
- b. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 518/15158/2004 tentang Pengembangan FEDEP.
- c. Surat dari Ketua Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Jawa Tengah (Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah) tanggal 24 Desember 2004, Nomor : FPESD/664/04 tentang Permohonan memfasilitasi Pendirian FEDEP.
- d. Surat Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Jawa Tengah tanggal 9 Juli 2007, Nomor : 500/11.764 tentang Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan FEDEP.

III. PERMASALAHAN

Permasalahan yang masih dihadapi Kabupaten Magelang dalam rangka pengembangan ekonomi lokal khususnya optimalisasi produk unggulan berbasis klaster di Kabupaten Magelang antara lain :

1. Masih rendahnya modal sosial para pelaku usaha klaster
2. Belum optimalnya jaringan pemasaran dan kemitraan
3. Kurangnya kapasitas sumber daya manusia, kurangnya akses permodalan,serta belum optimalnya penggunaan teknologi tepatguna.
4. Lemahnya manajemen kelembagaan pelaku usaha maupun kelembagaan klaster
5. Kesulitan bahan baku untuk produk-produk tertentu.

Untuk itu, kehadiran FEDEP sebagai forum diskusi pengembangan ekonomi lokal diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan UMKM tersebut dengan meningkatkan fungsi koordinasi dan perencanaan dalam menyusun usulan program/kegiatan yang disampaikan SKPD sesuai kebutuhan pelaku usaha.

IV. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan FEDEP adalah sebagai forum komunikasi adalah memfasilitasi dan membangun kesepahaman antar stakeholder dan pelaku usaha dalam pengembangan ekonomi wilayah dan penciptaan lapangan kerja melalui pemberdayaan ekonomi lokal melalui konsep klaster. Selain itu juga untuk memfasilitasi pemecahan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi lokal mulai dari hulu sampai hilir.

Tujuan pemerkuatan kelembagaan FEDEP dan klaster di Kabupaten Magelang melalui forum dialog adalah:

1. Membantu pemerintah dalam memprioritaskan program dan kegiatan pengembangan ekonomi lokal serta penciptaan lapangan kerja.
2. Membantu menyelesaikan permasalahan dunia usaha terutama yang dihadapi pelaku usaha.
3. Membantu mengidentifikasi dan menginventarisir produk unggulan daerah berbasis klaster yang potensial untuk dikembangkan secara terstruktur dan sistematis.
4. Memfasilitasi pengembangan jaringan strategis dalam rangka pengembangan ekonomi lokal melalui pendayagunaan, pengembangan dan memasyarakatkan teknologi dan inovasi.
5. Menjalinkan kerjasama antar FEDEP regional dan klaster untuk optimalisasi potensi klaster maupun produk unggulan lainnya.
6. Mengembangkan promosi investasi potensi daerah yang bisa mendorong pengembnagan ekonomi lokal.

V. SASARAN

Sasaran dari kegiatan penguatan kelembagaan FEDEP/*capacity building* FEDEP Kabupaten Magelang untuk Tahun 2019 adalah penguatan klaster ekonomi dalam manajemen, modal dan teknologi serta penumbuhan klaster ekonomi yang berbsis pada sentra produksi UMKM melalui :

1. Peningkatan monitoring, analisis dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi kebijakan ekonomi daerah

2. Optimalisasi peranan Klaster ekonomi dalam peningkatan kapasitas UMKM Kabupaten Magelang
3. Pengembangan jaringan informasi dan kerjasama antar FEDEP.
4. Optimalisasi koordinasi antar FEDEP regional dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan.
5. Optimalisasi pendampingan SKPD dan Tim FEDEP dalam pengembangan dan penguatan Klaster ekonomi.
6. Penyusunan dan promosi profil potensi investasi daerah.

VI. KLAS TER

Kiprah FEDEP Kabupaten Magelang telah mendapatkan apresiasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah terbukti pada tahun 2008 dan 2009 dikukuhkan menjadi FEDEP terbaik. Keberadaan FEDEP Kabupaten Magelang telah sedikit memberikan manfaat terkait dengan pengembangan klaster. Kabupaten Magelang telah membentuk dan memfasilitasi 7 (tujuh) klaster ekonomi yaitu:

1. Forum Rembug Klaster Pariwisata Borobudur
2. Klaster Pahat Batu
3. Klaster Slondok dan Puyur
4. Klaster Pertanian
5. Klaster Salak Nglumut
6. Klaster Ikan Air Tawar
7. Klaster Industri Bambu

Sasaran utama pengembangan klaster adalah untuk meningkatkan daya saing dan nilai dari hulu sampai hilir.

VII. PROGRAM KERJA FEDEP (KELUARAN/ OUTPUT)

Fokus kegiatan penguatan kelembagaan FEDEP dan Klaster tahun 2019 adalah lebih meningkatkan peran dan fungsi FEDEP membantu Pemerintah Daerah dalam pengembangan ekonomi lokal melalui:

1. Perencanaan, Evaluasi dan kajian rekomendasi pengembangan ekonomi lokal melalui Rapat Koordinasi baik Tim FEDEP maupun Pokja FEDEP.
2. Peningkatan Kapasitas SDM melalui pengiriman personil FEDEP dan pelaku usaha dalam forum diskusi dan pelatihan dari Provinsi Jawa Tengah atau lembaga lain yang terkait.
3. Workshop/ dialog/ temu usaha untuk memperkuat kemampuan dan kapasitas pelaku usaha klaster ekonomi

4. Pengawasan dalam pelaksanaan program pengembangan ekonomi lokal yang dilaksanakan oleh SKPD teknis.
5. Evaluasi program FEDEP dan klaster 2018
6. Usulan Rekomendasi Bupati dalam rangka pengembangan ekonomi lokal berbasis klaster 2020

Disamping pemerkuatan fungsi dan peran FEDEP juga pemerkuatan klaster melalui fasilitasi pertemuan klaster dan fasilitasi penyusunan program kerja klaster. Hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah:

1. Rekomendasi masukan berupa kebijakan pemecahan permasalahan pengembangan ekonomi lokal kepada Kepala Daerah.
2. Usulan program/kegiatan yang disampaikan dan diakomodir oleh dinas instansi terkait baik di Kabupaten maupun provinsi.
3. Adanya jaringan kerjasama antar klaster binaan di wilayah Kabupaten Magelang dan di kabupaten sekitarnya di Provinsi Jawa Tengah.

VIII. MANFAAT

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan penguatan kelembagaan FEDEP dan klaster adalah:

1. Perencanaan lebih partisipatif dimana masyarakat (pelaku usaha) diajak langsung untuk berdiskusi memprioritaskan program.
2. Program kegiatan lebih terfokus sesuai dengan harapan masyarakat.
3. Adanya nilai tambah dari adanya klaster.
4. Bertambahnya potensi unggulan ekonomi lokal.
5. Terjalinnnya kerjasama antar pemerintah, swasta, pelaku usaha dan *stakeholder* dalam pengembangan ekonomi lokal.
6. Terwujudnya jaringan kerjasama (*net working*) dalam pengembangan usaha dan fasilitasi kerjasama antar daerah.
7. Teridentifikasinya permasalahan dan rekomendasi kebijakan pengembangan ekonomi lokal.
8. Tersusunnya program dan kegiatan pengembangan ekonomi lokal secara sinergis, harmonis, dan berkelanjutan sehingga berdampak nyata (*quick wins*) bagi pelaku usaha.

IX. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan FEDEP dan Klaster berasal dari dana Bantuan Gubernur Jawa Tengah sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dan APBD Kabupaten Magelang sebesar Rp.40.900.000,- (*Empat Puluh Juta Rupiah Sembilan Ratus Ribu Rupiah*). Dan harapannya bantuan atau sharing

dari pihak lain yang diharapkan dapat membantu pemberdayaan klaster (perbankan, CSR, dan sebagainya).

Rincian rencana penggunaan anggaran sebagai berikut :

Triwulan 1	:	14.155.160,00
Triwulan 2	:	27.501.200,00
Triwulan 3	:	55.848.800,00
Triwulan 4	:	<u>43.394.840,00</u>
Jumlah	:	Rp. 140.900.000,00

X. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PERBULAN

NO	Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Ket.
			Rp	%	
1	Januari	0	0	0	
2	Februari	0	0	0	
3	Maret	12	14.155.160	10,0	
4	April	18	14.155.160	10,0	
5	Mei	24	14.155.160	10,0	
6	Juni	30	41.656.360	29,6	
7	Juli	38	41.656.360	29,6	
8	Agustus	48	41.656.360	29,6	
9	September	70	97.505.160	69,2	
10	Oktober	80	97.505.160	69,2	
11	Nopember	90	97.505.160	69,2	
12	Desember	100	140.900.000	100,0	

XI. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan FEDEP dan Klaster adalah bulan Pebruari sampai dengan Desember 2019 dan berlanjut untuk tahun selanjutnya.

XII. DAMPAK YANG DIHARAPKAN (*IMPACT*)

Dampak yang diharapkan dari kegiatan penguatan kelembagaan FEDEP adalah:

1. Meningkatnya efektifitas program pengembangan ekonomi lokal dalam upaya untuk peningkatan kapasitas usaha dan pendapatan
2. Terwujudnya Penguatan ekonomi lokal berbasis klaster, sehingga diharapkan adanya penciptaan lapangan kerja baru yang memberikan penghasilan masyarakat dan pada akhirnya meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

3. Terjalannya kerjasama antar FEDEP dan kluster usaha pelaku ekonomi lokal dengan pelaku usaha besar/ kluster lain yang saling menguntungkan.

XIII. PENUTUP

Keberadaan FEDEP dan kluster ekonomi membantu pemerintah daerah dalam rangka mencari terobosan-terobosan berupa kebijakan pengembangan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja yang melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada di daerah. Sehingga menjadi tugas pemerintah daerah untuk ikut pula mendorong FEDEP dan kluster agar optimal dan bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Mengetahui,
Kepala Bappeda dan Litbangda
Kabupaten Magelang

Drs. SUGIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, 31 Desember 2018

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


ASEP RAHMAT, SP, M.Si
Penata Tk. I
NIP. 19711206 200312 1 004

RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

I. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan public dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan, yang melibatkan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara partisipatif, yaitu merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan. Perencanaan pembangunan juga harus dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah. Kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian kualitas perencanaan pembangunan daerah menjadi syarat penting dalam keberhasilan pembangunan di daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan, bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah bidang

ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, kecamatan, kesatuan bangsa dan politik, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta pengawasan dan penanggulangan bencana, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan oleh Bidang Sosial dan Budaya pada Bappeda Kabupaten Magelang berupa :

1. Rapat Tim Perencanaan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, 6 kali rapat sebanyak 20 orang.
2. Rapat Fasilitasi Perencanaan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya 6 kali rapat sebanyak 20 orang.
3. Rapat Tm Teknis Penyusunan Masterplan Pendidikan, 8 kali rapat sebanyak 15 orang.
4. Rapat Tm Teknis Penyusunan Masterplan Islamic Center, 8 kali rapat sebanyak 15 orang.
5. Menyusun Masterplan Pendidikan melalui jasa konsultansi , 1 dokumen.
6. Menyusun Masterplan Islamic Center melalui jasa konsultansi, 1 dokumen.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Rapat Tim Perencanaan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya pada bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2019.
2. Rapat Fasilitasi Perencanaan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya pada bulan Januari s.d. Desember 2019.

3. Rapat Tim Teknis Penyusunan Masterplan Pendidikan pada Bulan Pebruari s.d. November 2019.
7. Rapat Tim Teknis Penyusunan Masterplan Islamic Center pada Bulan Pebruari s.d. November 2019.
8. Menyusun masterplan pendidikan melalui jasa konsultansi, pada bulan Maret s.d. September 2019.
4. Menyusun masterplan pendidikan melalui jasa konsultansi, pada bulan Maret s.d. September 2019.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tertuang dalam DPA Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang sejumlah Rp. 519.100.000,- (*lima ratus Sembilan belas juta seratus ribu rupiah*) dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut:

BULAN	BELANJA	JUMLAH
Januari	-	0
Februari	-	0
Maret	Honorarium Tim Non PNS	600.000
	Alat Tulis Kantor	682.000
	Belanja Dekorasi	450.000
	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000
	Makan dan Minum Rapat	13.750.000
	Perjalanan Dinas DD	8.270.000
	Perjalanan Dinas LD	25.292.700
	Belanja Jasa Konsultansi Masterplan Pendidikan	150.000.000
	Belanja Jasa Konsultansi Masterplan Islamic Center	150.000.000
	Belanja Narasumber	30.800.000
April	Honor Pengadaan Barang dan Jasa	3.700.000
Mei	Honor Tim PNS	26.060.000
	Belanja Penggandaan	1.148.000
Juni	Perjalanan Dinas LD	25.292.000
Juli	Alat Tulis Kantor	682.000
Agustus	-	0
September	Honor PNS	26.060.000
	Makan dan Minum Rapat	13.750.000
	Perjalanan Dinas DD	8.270.000
	Perjalanan Dinas LD	25.292.600
Oktober	-	0
November	-	0
Desember	-	0
JUMLAH		519.100.000

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Rencana prosentase target fisik dan keuangan per bulan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan %
		Rp.	%	
Januari	0,00	0	0,00	0,00
Februari	0,00	0	0,00	0,00
Maret	30,00	388.844.700	74,91	74,91
April	40,00	3.700.000	0,71	75,62
Mei	45,00	27.208.000	5,24	80,86
Juni	50,00	25.292.700	4,87	85,74
Juli	55,00	682.000	0,13	85,87
Agustus	70,00	0	0	85,87
September	75,00	73.372.600	14,13	100,00
Oktober	80,00	0	0	100,00
Nopember	90,00	0	0	100,00
Desember	100,00	0	0	100,00

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Kabupaten Magelang TA 2019 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Mengetahui :
Pengguna Anggaran

Drs. SUGYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, 2 Januari 2019

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

MARGONO, S.Sos.,MPA
Pembina
NIP. 19750405 199803 1 005

RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN SINKRONISASI
PELAKSANAAN UPAYA PENANGGULANGA KEMISKINAN DAN
PEMURUNAN KESENJANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

I. LATAR BELAKANG

I.1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain : tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki - laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak - hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak - hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak - hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak - hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki - laki. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Magelang pada tahun 2018 sebesar 11,23 persen, turun dibanding tahun sebelumnya 12,42%. Trend persentase penduduk miskin selama 5 tahun terakhir secara perlahan mengalami penurunan.

BAPPEDA dan Litbangda memiliki tugas fungsi untuk merumuskan kebijakan teknis perencanaan serta pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.

Pemerintah dalam upaya menekan angka kemiskinan ditempuh melalui berbagai program dan kegiatan yang berpihak pada pengentasan kemiskinan program kegiatan tersebut diampu oleh masing-masing SKPD sesuai tugas fungsinya, dengan prioritas utama penanggulangan kemiskinan.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya dokumen Rencana Kerja Operasional sebagai acuan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Perumusan

Kebijakan dan Sinkronisasi Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan di Kabupaten Magelang.

I. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan.

Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya pada Bappeda Kabupaten Magelang dengan keluaran 1 (satu) laporan koordinasi, dengan rincian sub kegiatan berupa :

1. Rapat Koordinasi Tim koordinasi TKPKD
2. Rapat Koordinasi Kelompok Kerja
3. Rapat Koordinasi Kelompok Program
4. Penyusunan Laporan Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan.

II. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Rapat Tim pada bulan Maret s.d Agustus 2019.
2. Rapat Pokja pada bulan Maret s.d Septembr 2019
3. Rapat Pokgram pada bulan April s.d Septembr 2019
4. Rakor TKPKD pada bulan Oktober 2019
5. Rapat Penyusunan Laporan pada bulan Oktober s.d Desember 2019
6. Menyusun dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan pada bulan Desember 2019

III. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Magelang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perencanaan Anggaran Tahun 2019 sejumlah Rp. 127.760.000,- (Seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian target penggunaan setiap bulan anggaran sebagai berikut :

1.	Januari	: Rp	188.000
2.	Februari	: Rp.	0
3.	Maret	: Rp.	9.199.700
4.	April	: Rp.	6.851.000
5.	Mei	: Rp.	32.842.000
6.	Juni	: Rp	1.800.000
7.	Juli	: Rp.	9.199.700
8.	Agustus	: Rp.	6.700.000
9.	September	: Rp.	1.880.000
10.	Oktober	: Rp.	1.880.000
11.	Nopember	: Rp.	55.419.600
12.	Desember	: Rp.	1.800.000

IV. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan %
		Rp	%	
Januari	5	188.000	0,15	0,15
Februari	10	-	-	0,15
Maret	20	9.199.700	7,20	7,35
April	30	6.851.000	5,36	12,71
Mei	35	32.842.000	25,71	38,42
Juni	40	1.800.000	1,41	39,83
Juli	45	9.199.700	7,20	47,03
Agustus	60	6.700.000	5,24	52,27
September	85	1.880.000	1,47	53,74
Oktober	95	1.880.000	1,47	55,21
Nopember	99	55.419.600	43,38	98,59
Desember	100	1.800.000	1,41	100,00

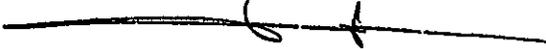
V. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Magelang Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Mengetahui :
Pengguna Anggaran


Drs. SUGIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, Januari 2019
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


WARSINI, S.Sos. MM.
Penata
NIP. 19691231 199203 2 018

**RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN FASILITASI KINERJA PENDIDIKAN UNTUK SEMUA (PUS)/
PENDIDIKAN SEPANJANG HAYA (PSH) KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

I. PENDAHULUAN

Pendidikan Untuk Semua (PUS)/ Pendidikan Sepanjang Hayat (PSH) adalah **goals/ tujuan** ke empat (4) dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ **Sustainable Development Goals (SDGs)**, yang merupakan hasil kesepakatan 193 negara anggota PBB dengan melibatkan partisipasi masyarakat sipil dan berbagai pemangku kepentingan untuk menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030.

Sejarah terbentuknya program Pendidikan Untuk Semua (PUS) atau *Education For All* (EFA) adalah berawal dari sebuah konsorsium organisasi sipil yang peduli akan pentingnya pendidikan untuk semua, terutama untuk perempuan dan anak-anak perempuan. Program Pendidikan Untuk Semua (PUS) dideklarasikan dalam acara World Education Forum Tanggal 26-28 April 2000 di Dakar, Senegal. Program ini berlangsung dari tahun 2000 hingga Tahun 2015.

Deklarasi Dakar terkait Pendidikan Untuk Semua (PUS) berakhir Tahun 2015, namun deklarasi ini diperdalam dan dilanjutkan melalui Deklarasi Incheon, Korea Selatan yang berlangsung kurun waktu 2016-2030.

Tujuan PUS/ PSH secara umum adalah Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030, sedangkan target PUS/ PSH adalah :

1. Pada tahun 2030, menjamin semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.
3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.
4. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.

5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.
6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.
7. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.
8. Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.
9. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.

Kebijakan-kebijakan strategis ini selaras dengan Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap pembangunan pendidikan, sehingga Pemerintah Indonesia menyepakati Deklarasi Incheon Korea Selatan Tahun 2015.

Untuk menindaklanjuti Deklarasi Incheon Korea Selatan, maka dalam pelaksanaannya dibentuk Forum Koordinasi Pendidikan Untuk Semua (PUS)/ Pendidikan Sepanjang Hayat (PSH) di tingkat pusat dan tingkat daerah.

Pada tahun 2019 pelaksanaan kegiatan PUS/ PSH di Kabupaten Magelang akan dilaksanakan dengan membentuk kelompok kerja (pokja) sesuai dengan target-target program PUS/ PSH.

Forum Koordinasi Pendidikan Untuk Semua (PUS)/ Pendidikan Sepanjang Hayat (PSH) memiliki 5 (lima) fungsi utama yaitu (1) merumuskan program, tahapan, tata-cara penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengembangan program serta kegiatan PUS/ PSH sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah kerja; (2) menyusun Rencana Aksi PUS/PSH baik rencana jangka panjang, menengah, dan pendek; (3) melakukan koordinasi, konsolidasi, sosialisasi, diseminasi, dan advokasi kepada seluruh komponen masyarakat dengan para pemangku kepentingan; (4) melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pendidikan terkait dengan target PUS/ PSH; dan (5) menyusun laporan dan review pelaksanaan program secara berkala.

Sebagai wujud komitmen terhadap pembangunan pendidikan, maka Kabupaten Magelang melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Kinerja Pendidikan Untuk Semua (PUS)/ Pendidikan Sepanjang Hayat (PSH) Tahun Anggaran 2018.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KEGIATAN

Kegiatan Fasilitasi Kinerja Pendidikan Untuk Semua (PUS)/ Pendidikan Sepanjang Hayat (PSH) di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda dan Litbangda) Kabupaten Magelang berupa :

1. Menyelenggarakan rapat koordinasi Forum PUS/PSH Kabupaten Magelang Tahun 2019, dengan target 5 (lima) kali kegiatan, peserta sebanyak 25 orang setiap kali rapat.
2. Koordinasi dan konsultasi dengan stake holder yang terkait baik yang berada di Kabupaten Magelang maupun luar Kabupaten Magelang.
3. *Foccus Group Discussion (FGD)* penyusunan RAD PUS/PSH Tahun 2019-2024, dengan target 2 (dua) kali kegiatan, peserta sebanyak 15 orang setiap kali rapat.
4. Rapat Tim Penyusun Laporan PUS, dengan target 5 (lima) kali kegiatan, peserta sebanyak 15 orang setiap kali rapat.
5. Penyusunan Laporan akhir fasilitasi Forum PUS/PPSH Kabupaten Magelang Tahun 2019, dengan target 1 (satu) dokumen.
6. Penyusunan RAD Pendidikan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, dengan target 1 (satu) dokumen.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Forum PUS/PPSH Kabupaten Magelang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Menyusun Surat Keputusan Bupati tentang Forum PUS/PSH Kabupaten Magelang Tahun 2019 pada Bulan Pebruari s.d. Maret 2019.
2. Menyusun Surat Keputusan Kepala Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang Tentang Tim Penyusun Laporan PUS/ PSH Tahun 2019 dan RAD-PUS/PSH Tahun 2019-2024 pada Bulan Juni 2018.
3. Menyelenggarakan rapat koordinasi Forum PUS/PSH Kabupaten Magelang Tahun 2019, dengan target 5 (lima) kali, sebanyak 25 orang per kali rapat pada Bulan Maret, April, Mei, Juni dan Desember 2019.
4. Koordinasi dan konsultasi dengan stake holder yang terkait baik yang berada di Kabupaten Magelang maupun luar Kabupaten Magelang pada bulan Januari s.d. Desember 2019.

5. *Focus Group Discussion* (FDG) penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pendidikan Untuk Semua (PUS)/ Pendidikan Sepanjang Hayat (PSH) Tahun 2019-2024, dengan target 2 (dua) kali rapat dengan jumlah peserta 15 orang pada Bulan Agustus 2019.
6. Rapat Tim Penyusun Laporan PUS/ PSH, dengan target 5 (lima) kali, sebanyak 15 orang per kali rapat pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober dan Nopember 2019.
7. Seminar Laporan Tahunan PUS/ PSH Tahun 2019 dan RAD-PUS/PSH Tahun 2019-2024, dengan target 1 kali kegiatan jumlah peserta 100 orang pada Bulan November 2019
8. Penyusunan RAD-PUS/PSH Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, dengan target 1 (satu) dokumen pada bulan Nopember dan Desember 2019.
9. Penyusunan laporan akhir fasilitasi Forum PUS/PPSH Kabupaten Magelang Tahun 2019, dengan target 1 (satu) dokumen pada bulan Nopember dan Desember 2019.

IV. TARGET PENGUNAAN ANGGARAN

Penganggaran/biaya Kegiatan Fasilitasi Kinerja Pendidikan Untuk Semua (PUS) di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tertuang dalam DPA Bappeda dan Litbangda adalah sejumlah Rp. 82.767.000,- (*delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*) dengan target penggunaan anggaran sebagai berikut:

BULAN	BELANJA	JUMLAH
Januari	-	0
Februari	-	0
Maret	Honorarium Tim PNS	5.475.000
	Honorarium Tim Non PNS	900.000
	Alat Tulis Kantor	1.909.000
April	Makan dan Minum Rapat	1.012.500
Mei	Honorarium Tim PNS	10.950.000
	Honorarium Tim Non PNS	1.880.000
	Makan dan Minum Rapat	1.012.500
Juni	Honor Tim PNS	4.100.000
	Penggandaan	200.000
	Perjalanan Dinas LD	3.000.000
Juli	Makan dan Minum Rapat	607.500
Agustus	Honor Tim PNS	8.200.000
	Uang Saku Peserta PNS	1.200.000
	Honor Tim Non PNS	120.000
	Alat Tulis Kantor	177.000
	Transport Peserta	1.200.000
September	Makan dan Minum Rapat	2.227.500
	Honor PNS	4.100.000
	Penggandaan	400.000
Oktober	Makan dan Minum Rapat	607.500
	Makan Minum Rapat	607.500
November	Honor Tim PNS	300.000

	Uang Saku Peserta Kegiatan	3.600.000
	Honor Tim Non PNS	120.000
	Alat Tulis Kantor	590.000
	Dekorasi	160.000
	Transport Peserta	1.200.000
	Honor Narasumber	2.650.000
	Penggandaan	476.000
	Cetak	570.000
	Makan dan Minum Rapat	4.657.500
	Perjalanan DD	570.000
	Perjalanan LD	5.650.000
Desember		300.000
		1.012.500
JUMLAH		82.767.000

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Rencana prosentase target fisik dan keuangan per bulan Kegiatan Fasilitas Kinerja Pendidikan Untuk Semua (PUS) di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan %
		Rp	%	
Januari	0,00	0	0,00	0,00
Februari	0,00	0	0,00	0,00
Maret	5,00	11.296.000	13,65	13,65
April	10,00	1.012.500	1,22	14,87
Mei	30,00	13.842.500	16,72	31,60
Juni	40,00	8.312.500	10,04	41,64
Juli	50,00	607.500	0,73	42,38
Agustus	70,00	13.124.500	15,86	58,23
September	75,00	12.107.500	14,63	72,86
Oktober	80,00	607.500	0,73	73,59
Nopember	90,00	20.543.500	24,82	98,42
Desember	100,00	1.312.500	1,59	100,00

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Fasilitas Kinerja Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kabupaten Magelang TA 2019 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Mengetahui :
Pengguna Anggaran

Drs. SUGIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, 2 Januari 2019
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

MARGONO, S.Sos.,MPA
Pembina
NIP. 19750405 199803 1 005

**RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG TATA RUANG
PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

I. PENDAHULUAN

Koordinasi bidang tata ruang pengembangan wilayah dan infrastruktur merupakan kegiatan yang penting dan menunjang tugas dan fungsi SKPD. Kegiatan ini ditujukan untuk menunjang dan mengawal proses perencanaan dalam urusan: Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Penataan Ruang, Komunikasi dan Informatika, dan Perhubungan.

Pengawasan proses perencanaan ini meliputi aktifitas rapat koordinasi, rapat teknis, dan pembahasan lainnya dalam ranah bidang Tata Ruang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur. Secara teknis dilakukan dengan metode Rapat Teknis, Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Instansi Pusat, Provinsi dan lembaga lainnya.

Selain itu dalam kegiatan ini juga memfasilitasi penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030 dengan mengalokasikan anggaran untuk pembahasan, koordinasi dan kegiatan pendukung lainnya.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Koordinasi Bidang Tata Ruang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Tata Ruang Pengembangan Wilayah Bidang Tata Ruang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang. Indikator Kinerja Kegiatan :

1. Penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO) pada bulan Januari 2019;
2. Penyusunan Surat Keputusan Kepala Bappeda dan Litbangda tentang Tim Pelaksana Kegiatan;
3. Rapat Fasilitasi untuk 4 (empat) Urusan Bidang Tata Ruang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur sebanyak 36 (tiga puluh enam) Kali;
4. Rapat Pembahasan RTRW sebanyak 12 (dua belas) kali;
5. Pelaksanaan Koordinasi penyusunan RTRW sebanyak 10 (sepuluh) kali;

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Renja SKPD adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO) pada bulan Januari 2019;
2. Penyusunan SK Kepala Bappeda dan Litbangda tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan;
3. Rapat Koordinasi akan dilakukan mulai pada Minggu I bulan Januari 2019;
4. Fasilitasi Konsultasi dan Koordinasi akan dimulai pada Minggu I bulan Januari 2019;
5. Penyusunan Laporan Bulanan dan Laporan Akhir pelaksanaan Kegiatan;

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Kegiatan Penyusunan Renja SKPD sebagaimana tertuang dalam DPA 2018 sejumlah Rp 219.839.500 (dua ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut:

- Triwulan I : Rp 48.632.700
 - Triwulan II : Rp 54.414.700
 - Triwulan III : Rp 62.655.000
 - Triwulan IV : Rp 54.137.100
- JUMLAH : Rp 219.839.500**

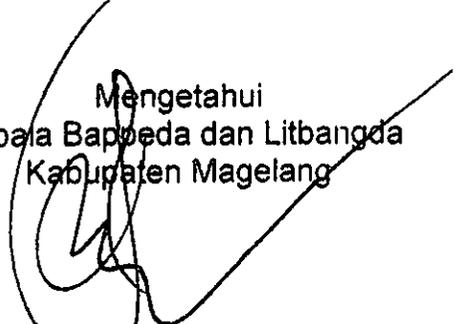
V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan	Target Fisik	Target Keuangan		Keterangan
		Rp.	%	
Januari	5	9,131,700.00	4.2	
Februari	12	24,678,700.00	11.3	
Maret	23	48,632,700.00	22.2	
April	30	63,885,700.00	29.1	
Mei	40	86,840,700.00	39.5	
Juni	50	103,047,400.00	46.9	
Juli	57	122,301,400.00	55.7	
Agustus	63	146,448,400.00	66.7	
September	74	165,702,400.00	75.5	
Oktober	80	184,956,400.00	84.3	
November	90	204,585,400.00	93.2	
Desember	100	219,839,500.00	100	

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Kegiatan Koordinasi Bidang Tata Ruang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur TA 2019 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Mengetahui
Kepala Bappeda dan Litbangda
Kabupaten Magelang


Drs. SUGIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, 2 Januari 2019
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


ADANG ATFAN L, ST, MT
Penata Tk I
NIP. 19830210 200604 1 005